

BAB 3

REALITAS KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Demokrasi atau pemerintahan oleh rakyat berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri yang memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Demokrasi yang baik mengandaikan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kematangan dalam berpolitik, memiliki penilaian yang baik, dan mendahulukan tuntutan-tuntutan kesejahteraan umum daripada kepentingan-kepentingan pribadinya.

Bab 3 ini terbagi dalam tiga subbab, yaitu: pandangan demokrasi, praktik kehidupan demokrasi di Indonesia, dan kegagalan demokrasi di Indonesia. Pandangan demokrasi menjelaskan tentang pemikiran demokrasi menurut teori polis Athena pada zaman Yunani Kuno dan teori demokrasi modern menurut Carol C. Gould. Praktik kehidupan demokrasi di Indonesia menjelaskan tentang pemetaan demokrasi di Indonesia, peranan kelas menengah, mobilisasi sosial, dan peran agama dalam demokrasi. Kegagalan demokrasi di Indonesia menjelaskan tentang imbas dari tidak adanya pertumbuhan ekonomi, budaya liberal, dan kesepakatan kaum elit dalam demokrasi di Indonesia.

3.1 Pandangan Demokrasi

Robert A. Dahl mengemukakan bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem politik di mana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lain sebagai orang-orang yang sama dipandang dari segi politik; berdaulat secara bersama-sama dan memiliki segala kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri. Gagasan demokrasi ini muncul pertama kali pada abad ke-5 di kota Athena (Dahl, 1992: xxviii). Sekarang, pembatasan demokrasi pada sistem-sistem berskala kecil telah diperluas. Teori-teori demokrasi yang dianut oleh kritikus demokrasi modern maupun sebuah negara telah melebihi batas-batas *polis* yang sempit.

3.1.1 Teori Demokrasi Polis Athena

Demokrasi yang pertama kali adalah demokrasi dengan ruang lingkup kecil, yaitu bentuk demokrasi langsung, maksudnya tidak mengenal istilah perwakilan. Dalam hal demokrasi langsung Dahl berpendapat bahwa yang disebut sebagai *demos* (rakyat/warga negara) bukanlah keseluruhan dari penduduk atau warga yang tinggal di dalam batas-batas kota tersebut. *Demos* tidak mencakup golongan perempuan, anak-anak, budak, orang asing, dan *professionals*.⁷ Menurut pandangan demokrasi polis Athena, sebuah negara demokrasi tidak boleh terlalu besar. Hal ini dijadikan persyaratan agar semua warga negara dapat bertemu bersama-sama di majelis yang nantinya bisa bertindak sebagai pemerintah kota tersebut, sekaligus agar semua warga negara dapat saling mengenal (Dahl, 1992: 9).

Dalam pandangan demokrasi polis Athena, suatu tatanan demokrasi sekurang-kurangnya harus memenuhi enam persyaratan, yaitu:

- (a). Warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka sehingga mereka sama-sama memiliki suatu perasaan yang kuat tentang kepentingan umum dan bertindak atas dasar itu.
- (b). Warga negara benar-benar harus amat padu dan homogen dalam hal ciri-ciri khas. Hal ini untuk mengurangi kecenderungan timbulnya konflik politik dan perbedaan pendapat yang tajam mengenai kepentingan umum.
- (c). Warga negara harus memiliki jumlah yang sedikit. Hal ini dimaksudkan agar menghindari keragaman, memperkuat persaudaraan serta pemahaman akan kebutuhan negaranya, dan memudahkan perkumpulan dalam majelis.
- (d). Warga negara harus dapat berkumpul dan memutuskan undang-undang dan kebijakan-kebijakan secara langsung, tidak melalui perwakilan.
- (e). Warga negara harus berpartisipasi dalam memerintah dan menduduki jabatan kota, tidak hanya menghadiri pertemuan-pertemuan di majelis saja.

⁷ Suatu golongan masyarakat yang sibuk menggeluti profesi mereka sehingga tidak punya waktu untuk memikirkan masalah-masalah dalam *polis*. Lihat Dahl, 1992: xxx.

- (f). Negara harus sepenuhnya otonom. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap negara harus berswasembada, tidak hanya secara politik tetapi juga secara ekonomi dan militer (Dahl, 1992: 13-15).

Dari enam persyaratan demokrasi polis Athena ini, satu di antaranya masih dianut oleh sistem demokrasi di Indonesia, yaitu “warga negara harus berpartisipasi dalam memerintah dan menduduki jabatan kota.” Untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, pemerintah harus membuat berbagai macam lapangan pekerjaan dan perusahaan di setiap daerah atau kota di Indonesia. Perusahaan milik pemerintah adalah perusahaan yang segala kepentingan usahanya diatur oleh pemerintah, demi kemaslahatan segenap warga negara. Perusahaan pemerintah ini memiliki tingkat jabatan yang banyak. Dari setiap jabatan tersebut, mulai dari tingkat jabatan yang terendah hingga yang tertinggi, diisi dan diduduki oleh warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang menduduki jabatan di pemerintahan inilah yang bisa digolongkan sebagai *participant* dalam jabatan kota seperti dalam polis Athena. Demokrasi mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi dan setiap warga negara harus mengabdikan kepada pemerintahan kota di mana ia berada.

Bila menilik persyaratan demokrasi polis Athena pada butir “f”, Indonesia sebenarnya sudah cukup otonom dalam urusan politik dan ekonomi. Sejak runtuhnya rezim militeristik Orba, Indonesia menjadi negara yang terbuka dan bebas, baik dalam hal berekspresi maupun berpolitik. Kini, segenap warga negara mulai menata kehidupan berbangsa dan bernegaranya sendiri. Bila dilihat dari sisi kemajuan ekonomi sekaligus pangan, Indonesia telah berhasil melakukan swasembada beras. Indonesia sudah bisa menjamin perekonomian dan perpolitikan negara secara otonom. Namun, dengan jatuhnya rezim militeristik maka perkembangan di bidang militer juga berkurang. Indonesia kini sulit menjaga kedaulatan di perbatasan negara bila berkonfrontasi dengan pihak asing. Terbukti dengan banyaknya kapal perompak dari negara lain yang sering menangkap ikan di wilayah lautan Indonesia. Kondisi stabilitas negara juga semakin tidak aman. Terbukti dengan semakin banyaknya aksi demonstrasi massa yang berlangsung secara *anarchist*. Kekuatan militer merupakan persyaratan

demokrasi polis Athena yang *crucial* dalam hal menjaga stabilitas dan otonomi negara.

Selain dari persyaratan demokrasi polis Athena berupa partisipasi setiap warga negaranya, tidak ada lagi persyaratan yang dipenuhi oleh demokrasi Indonesia. Perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan yang lain masih sering terjadi (melanggar butir “a”). Warga negara Indonesia sangat plural dalam hal etnis, agama, dan ras (melanggar butir “b”). Jumlah penduduk Indonesia sangat besar (melanggar butir “c”), oleh karena terlalu besar dalam jumlah penduduk dan luas wilayah maka tidak akan memungkinkan setiap warga negara bisa berkumpul di dalam majelis serta menyuarakan aspirasinya secara langsung (melanggar butir “d”). Jadi, menurut teori demokrasi polis Athena, Indonesia tidak bisa menjalankan demokrasi.

3.1.2 Teori Demokrasi Modern menurut Carol C. Gould

Penulis memilih teori yang dikemukakan oleh Carol C. Gould sebagai bahan pemahaman perkembangan konsep demokrasi. Pilihan ini dilakukan dengan alasan bahwa telaah yang dilakukan Gould mengikutsertakan kerangka ontologi yang *coherent* pada tataran filosofis dalam meninjau konsep demokrasi. Tiga model teori demokrasi menurut klasifikasi Gould yaitu: (a). model individualisme liberal, (b). model pluralis, dan (c). model sosialisme holistik (Nurtjahjo, 2006: 60).

3.1.2.1 Model Individualisme Liberal

Teori demokrasi model individualisme liberal menjelaskan bahwa demokrasi berfungsi sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal dan hak bagi seluruh rakyat itu dalam proses politik. Pandangan ini ditandai oleh sistem ‘satu orang satu suara’ atau *one man one vote*. Penilaian ontologi sosial yang khas model demokrasi ini diuraikan Gould sebagai berikut:

Ontologi yang diletakkan oleh teori demokrasi politik ini adalah apa yang kita sebut individualisme abstrak. Teori ini memahami individu atau orang sebagai dasar entitas yang menyusun masyarakat. Ini bersifat abstrak jika dilihat dari kenyataan bahwa manusia dalam beberapa aspeknya berbeda satu sama lain, dan sebaliknya memandang manusia dalam kerangka sifat-sifat universal saja, yakni sifat-sifat yang dimiliki oleh semua manusia dan yang membuat mereka sebagai individu. Atas pemahaman ini individualisme liberal memandang setiap individu berada pada posisi yang sederajat dalam kemerdekaan dan hak-haknya. Individu dipahami sebagai pelaku yang bebas dalam hal ia memiliki kebebasan untuk memilih. Ini semua mensyaratkan kebebasan negatif, atau tidak adanya gangguan dari luar, sebagai kondisi yang diperlukan. (Nurtjahjo, 2006: 60).

Dari penilaian ontologis tersebut dapat kita simpulkan bahwa esensi teori ini memberikan tekanan pada kebebasan individu yang sederajat untuk bebas memilih dengan menolak adanya intervensi dari pihak luar dalam bentuk apa-pun.

3.1.2.2 Model Pluralis

Teori demokrasi pluralis menekankan adanya kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas. Teori ini merupakan kebalikan dari teori individualisme liberal. Di sini pluralisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai *aggregation*⁸ dari kepentingan individu, dan pemunculan kepentingan individu justru akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Demokrasi politik ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan yang menengahi konflik atau kompetisi guna memperoleh keseimbangan sosial. Pluralisme melindungi kebebasan tiap individu untuk memilih dengan menyediakan alternatif-alternatif politik yang mampu mewakili pluralitas *interest group*⁹ ataupun partai. Struktur politik yang diciptakannya adalah menutup kemungkinan hegemoni dari suatu kelompok atau partai tunggal (Nurtjahjo, 2006: 61).

⁸ Pengumpulan suatu kelompok individu ke dalam satu kesatuan.

⁹ Kelompok yang berkepentingan.

Gould menilai bahwa ontologi sosial yang dicanangkan oleh teori pluralis dapat disebut sebagai ontologi campuran.¹⁰ Entitas kehidupan sosial secara ontologis adalah berisikan individu-individu yang mengejar kepentingan pribadi mereka sebagai pemilih-pemilih yang rasional. Entitas yang efektif dalam membentuk kehidupan sosial adalah kelompok-kelompok individu itu sendiri. Hubungan sosial yang merupakan konsekuensi model ini adalah hubungan-hubungan antara kelompok dibanding hubungan antara individu. Hubungan-hubungan ini bersifat eksternal, artinya tiap kelompok mendefinisikan sesuatu dengan merujuk pada kepentingan yang tetap atau baku, dan tidak akan berubah walaupun hubungan dengan kelompok lain sedang berlangsung (Nurtjahjo, 2006: 61).

Teori demokrasi pluralis inilah yang dapat diaplikasikan dalam demokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan partai politik. Dalam interaksi sosial-politik, setiap individu tidak muncul sebagai subjek tunggal, melainkan berdasarkan latar belakang kelompoknya. Kepentingan individu melebur di dalam kelompok di mana ia bernaung. Interaksi antara satu kelompok dengan kelompok lain berdasarkan *issue* yang diangkat sebagai pengikat kelompok itu. Bila *issue* kelompok itu bercirikan suatu suku tertentu – misalnya FBR atau Forum Betawi Rempug – maka orang-orang di dalam kelompok tersebut akan berinteraksi dengan kelompok lain dengan tetap membawa ciri-ciri FBR itu. Kekuatan kelompok akan mengakomodasi kepentingan individu-individu di dalamnya sebagai media interaksi sosial-politik.

3.1.2.3 Model Sosialisme Holistik

Teori pandangan sosialisme holistik merupakan pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapi ditolaknyanya kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan individualisme liberal. Pandangan ini diwakili oleh dua jenis teori utama, yaitu:

¹⁰ Pandangan ini tetap mempertahankan individualisme sebagai dasar, namun menggabungkannya dengan penekanan terhadap keutuhan/kesatuan dalam kelompok. Masyarakat sebagai keseluruhan dipandang tidak sebagai *individual aggregation*, tetapi sebagai *group aggregation*.

- (a). Teori demokrasi liberal, di mana memahami demokrasi ekonomi sebagai cara pendistribusian barang dan kesempatan secara lebih adil dalam konteks bentuk-bentuk demokrasi politik.
- (b). Teori demokrasi sosialis, yang menekankan perlunya demokrasi dalam mengendalikan produksi maupun distribusi.

Gould menilai melalui kedua teori itu bahwa demokrasi liberal lebih menekankan partisipasi individu dalam proses pembuatan keputusan bagi kehidupan ekonomi maupun politik, walaupun nantinya bertujuan akhir pada keadilan sosial. Demokrasi sosialis melihat komunitas atau masyarakat secara keseluruhan sebagai keutamaan, sedangkan politik dan bentuk-bentuk pemerintahan sebagai hal yang berada di bawah kehidupan ekonomi. Teori yang kedua inilah yang menjadi dasar utama dari teori sosialisme holistik (Nurtjahjo, 2006: 62).

Anggapan ontologis dari pandangan sosialisme holistik ini adalah bahwa entitas dasar kehidupan sosial adalah keseluruhan atau totalitas sosial. Individu-individu hadir sebagai bagian dari keseluruhan dan dalam peran maupun fungsinya yang harus dimainkan di dalam keseluruhan itu. Keseluruhan itu identik dengan segenap hubungan yang ada di dalamnya. Semua itu merupakan hubungan internal, dalam arti bahwa masing-masing memiliki semua dan dimiliki oleh semua. Individu-individu dalam keseluruhan tersebut tidak merupakan apa-pun kecuali apa yang terdapat di dalam hubungan-hubungannya.¹¹

Pandangan sosialisme holistik ini memiliki pengaruh di mana kebebasan tampak sebagai kebebasan dari keseluruhan untuk mengaktualisasikan potensi-potensinya melalui kegiatan-kegiatan individu. Kebebasan individu diwujudkan sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka membantu teraktualisasinya potensi totalitas. Tujuan akhirnya adalah kemakmuran ekonomi totalitas masyarakat, sebab ekonomi sebagai suatu kondisi bagi kebebasan telah terpenuhi. Konsep tentang demokrasi ekonomi merupakan unsur pendukung yang penting bagi sisi penekanan pada demokrasi politik (Nurtjahjo, 2006: 63).

¹¹ Maksud dari “hubungan-hubungannya” di sini adalah bagian atau fungsi dari totalitas. Lihat Nurtjahjo, 2006: 63.

3.2 Praktik Kehidupan Demokrasi di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dari setiap pulau yang ada di Indonesia terdapat beberapa etnis, suku, dan agama yang beragam. Ditambah lagi dengan banyaknya lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Ini mengakibatkan kehidupan sosial-politik di Indonesia bersifat plural. Kehidupan demokrasi di Indonesia juga selalu diwarnai dengan hal-hal yang menyangkut dengan azas pluralisme.

3.2.1 Pemetaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia adalah sebuah sistem sosial-politik yang berdasarkan UUD '45, yang diterapkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia sejak Orde Lama hingga reformasi sekarang ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Corak demokrasi yang diterapkan oleh setiap pemimpin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bila melihat berdasarkan ciri-ciri kepemimpinan presiden yang pernah/masih menjabat di RI, maka pemetaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi enam bagian, yaitu: (a). demokrasi pada kepemimpinan Soekarno, (b). demokrasi pada kepemimpinan Soeharto, (c). demokrasi pada kepemimpinan Habibie, (d). demokrasi pada kepemimpinan Gus Dur, (e). demokrasi pada kepemimpinan Megawati, dan (f). demokrasi pada kepemimpinan SBY.

3.2.1.1 Demokrasi pada kepemimpinan Soekarno

Pada awal kemerdekaan, Indonesia dikuasai oleh sebuah rezim yang disebut Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Selama tahun 1950-1957, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Parlementer, yaitu sistem demokrasi yang kebijakan-kebijakannya diajukan dan diperjuangkan oleh anggota dewan yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat. Di sini, Soekarno mencita-citakan sebuah masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis yang diimpikan Soekarno adalah masyarakat yang sejahtera bukan karena ia kaya materi saja, akan tetapi juga kaya budi pekerti dan nilai-nilai spiritual (“Demokrasi Soekarno”). Dalam hal berdemokrasi, Soekarno membuat semacam paham kesatuan dari pluralisme masyarakat yang disebut dengan Nasakom, singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Namun dalam kenyataannya aplikasi dari

Nasakom ini tidak bisa membuat bangsa Indonesia menjadi bersatu. Sebaliknya ia justru semakin menampakkan *difference* antara kelompok satu dengan yang lain. Demokrasi Parlementer yang relatif bebas ternyata telah menunjukkan kegagalannya yang pada akhirnya sistem ini dianggap terlalu liberal dan bebas serta tidak mencerminkan kepribadian bangsa (Haris, 1995: 8). Susunan kabinet mengalami proses jatuh-bangun. Eksperimen demokrasi dianggap terlalu mahal diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang sedemikian terfragmentasi dan terpuruk kecerdasan *collective*-nya (Denny J.A, 2006: 18).

Selanjutnya diberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin pada tahun 1957. Demokrasi terpimpin adalah suatu bentuk demokrasi yang seluruh kebijakan-kebijakannya diatur oleh pusat pemerintahan, yakni presiden Soekarno sendiri. Pemberlakuan sistem Demokrasi Terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno justru membuat kehidupan sosial-politik rakyat Indonesia menjadi tidak bebas. Kebijakan-kebijakan Soekarno terlalu otoriter. Kritik dan pemikiran yang berbeda dan bertentangan dengan Soekarno langsung dianggap sebagai musuh dan penghalang, sehingga siapa saja yang mencoba melakukannya akan ditindas atas nama ketertiban dan stabilitas negara. Demokrasi Terpimpin telah menyebabkan kehancuran ekonomi. Suhu politik di dalam masyarakat sangat tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk membangun kembali perekonomian harus dimulai dengan restrukturisasi sistem politik yang bertendensi untuk menunda demokrasi (Denny J.A, 2006: 18).

Penerapan demokrasi pada rezim Orde Lama bukanlah sebuah demokrasi, melainkan sebuah kepemimpinan yang otoriter yang terpusat. Substansi yang terkandung dalam rezim Orde Lama adalah stabilitas negara, mengingat bangsa Indonesia masih terlalu labil untuk membangun negaranya sendiri. Bangsa Indonesia masih belum bisa dilepaskan begitu saja tanpa ada pengawasan dari negara karena mereka masih banyak yang menganut nilai-nilai primordialisme buta yang belum diikuti dengan taraf kemajuan berpikir dan perekonomian yang baik. Bila negara tidak memainkan peranan yang penting dalam mengatur masyarakat atau membiarkan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, dikhawatirkan akan terjadi konflik massa yang meluas. Alhasil, Soekarno mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang otoriter demi menyelaraskan dan

menyatu-padukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem Demokrasi Parlementer yang diterapkan Soekarno Demokrasi Terpimpin ini bertahan hingga tahun 1965 (Haris, 1995: 12). Sejak itu, berakhirilah rezim Orla yang dipimpin oleh Soekarno.

3.2.1.2 Demokrasi pada kepemimpinan Soeharto

Rezim Orde Baru yang dibawa oleh Soeharto adalah rezim pengganti dari rezim Orde Lama. Sistem demokrasi yang diterapkan oleh Soeharto kepada masyarakat adalah apa yang disebut dengan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berdasarkan ideologi Pancasila yang dapat dilihat dalam pembukaan dan isi batang tubuh UUD '45 beserta penjelasannya (Noer Arfani, 1996: 49). Demokrasi Pancasila hanya sebuah paham yang multitafsir yang ujung-ujungnya hanya mementingkan golongan tertentu, yaitu: keluarga, kerabat, dan kroni-kroni Soeharto dalam memantapkan kekuasaan di pemerintahan RI. Pada masa itu kehidupan sosial-politik di Indonesia juga dijalankan dalam ranah otoriter dan militeristik 'tangan besi' yang membelenggu kebebasan berekspresi warganegaranya.

Setiap pemimpin yang baru saja memperoleh kekuasaan pasti menghadapi persoalan bagaimana untuk tetap berkuasa. Apapun tujuan jangka panjang yang hendak dicapai olehnya, tujuan jangka pendeknya pastilah cara untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan. Tanpa kekuasaan yang cukup besar dan efektif, cita-cita luhur – seperti menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera – tidak akan pernah tercapai. Maka dari itu tugas pertama seorang pemimpin adalah memperkuat posisi kekuasaannya agar ia bisa melakukan perubahan bagi masyarakat (Noer Arfani, 1996: 97)

Substansi dari rezim Orba adalah pembentukan sebuah kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat serta mantap yang disebut dengan *strong government*. Rezim Orba mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada rezim Orla, yaitu ketidakmampuan negara untuk menangani masalah sosial, politik, dan ekonomi akibat lemahnya kepemimpinan. Pemerintahan yang kuat dianggap lebih mungkin untuk menjamin efektifitas penerapan kebijakan ekonomi dan politik, walaupun

membutuhkan pengorbanan besar dari masyarakat. Kebijakan stabilisasi yang berguna untuk mengejar pertumbuhan ekonomi memerlukan keberanian dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer dan demokratis. Hal ini dapat segera dilaksanakan dengan lancar apabila proses pembuatan kebijakan pemerintah tidak harus melalui perundingan yang berlarut-larut atau gangguan dari pihak lain. Di sini, pemimpin membutuhkan suatu struktur yang bisa melapangkan jalannya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Rezim Orde Baru inilah yang merupakan struktur yang selalu melakukan *succession* untuk melanggengkan serta memperkuat posisi Soeharto sebagai pimpinan puncak eksekutif.

3.2.1.3 Demokrasi pada kepemimpinan Habibie

Habibie diangkat menjadi presiden RI yang ketiga setelah mengambil alih jabatan dari Soeharto pada tahun 1998. Masa kepemimpinan Habibie adalah masa transisi dari sebuah sistem diktatorial kepada sistem demokrasi multipartai. Pada masa pemerintahan Soeharto tidak pernah memungkinkan partai oposisi manapun untuk memenangkan kekuasaan dalam pemilu. Pemerintahan Habibie memberi prioritas untuk memperbarui undang-undang perpolitikan itu dan mengupayakan penyusunan sistem baru dalam pemilu dan perwakilan yang lebih dapat diterima dan terakomodasi dalam UUD'45 (Manning dan Van Diermen, 2000: 19). Sistem Demokrasi Pancasila sudah diperbaharui dengan sentuhan reformasi. Di sini, budaya ketakutan yang menghambat perdebatan politik di tataran nasional sudah mulai lenyap.

Di sisi lain, pemerintahan peralihan Habibie merupakan suatu bencana. Praktik korupsi besar-besaran masih terus berlanjut. Pengelolaan perekonomian yang salah membuat calon-calon investor menjadi takut untuk menanamkan modalnya. Kekerasan massal yang terjadi di Ambon, Kalbar, dan Timor Timur telah menggoreskan luka yang mendalam serta memunculkan puluhan ribu pengungsian dalam negeri. Ini semua menghambat kepulihan Indonesia dari krisis ekonomi yang mendalam.

Di bawah pemerintahan Habibie, negara ini lebih lemah dan tidak bersatu-padu bila dibandingkan dengan masa pemerintahan Soeharto. Penyebabnya adalah

merosotnya kapasitas kekuasaan akibat dampak krisis ekonomi yang merupakan kegagalan Soeharto untuk membentuk mekanisme pemerintahan yang baik dan terpercaya. Saat itu kekuasaan dijadikan sangat personal dan birokrasi dipolitisir sedemikian rupa, sehingga saat Soeharto turun jabatan maka jejaring penyokong yang sangat luas dan kuat guna membantu mempertahankan negara itu juga ikut buyar. Ketika unsur pemersatu itu hilang, maka politik didominasi oleh pergulatan yang berusaha untuk membangun pusat-pusat kekuasaan baru, baik dalam skala nasional maupun lokal (Manning dan Van Diermen, 2000: 18).

Substansi demokrasi yang diketengahkan oleh Habibie adalah pelaksanaan reformasi serta pemecahan sentralisasi kekuasaan yang telah lama dibangun oleh Soeharto. Sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi yang diterapkan Soeharto selain tidak efisien dan demokratis, hal ini juga merupakan suatu bentuk pemerintahan yang tidak dapat bertahan lama karena banyaknya ancaman kekerasan yang selalu dibungkam secara represif. Corak masyarakat di bawah kepemimpinan Soeharto bagaikan sebuah 'api dalam sekam' yang siap terbakar kapan saja akibat dari sentralisasi dan represi politik. Maka dari itu, kebijakan Habibie adalah desentralisasi politik dan ekonomi agar hak-hak tiap warga negara dapat terjamin.

3.2.1.4 Demokrasi pada kepemimpinan Gus Dur

Gus Dur menjadi presiden Indonesia melalui pemilu dan Sidang Umum MPR 1999. Pengangkatan Gus Dur untuk menjadi presiden ini masih merupakan cara transisi politik yang belum demokratis, karena PKB sebagai partai politik yang Gus Dur tidak memenangkan pemilu 1999. Pemenang pemilu adalah PDIP yang seharusnya secara langsung mengangkat Megawati sebagai presiden. Akan tetapi, karena terjadi proses tawar-menawar politik yang akhirnya menengahkan masalah *gender*, maka Gus Dur sebagai presiden dan Megawati hanya sebagai wakilnya. Gus Dur sendiri menganggap mekanisme pengangkatan dirinya ini merupakan masalah yang harus segera ditangani, sebab hal itu tidak efisien dan memberikan persepsi yang 'miring' kepada masyarakat Indonesia yang majemuk (Manning dan Van Diermen, 2000: 45).

Kepemimpinan Gus Dur berusaha untuk meninggalkan era otoritarianisme yang diwariskan oleh Orba. Bila gejala masyarakat di era Soeharto yang dominan adalah semangat nasionalisme, maka Gus Dur mengangkat semangat demokrasi. Gus Dur adalah seorang tokoh agama mayoritas di Indonesia, yaitu Islam. Maka dari itu, langkah-langkah kebijakan yang diambil Gus Dur adalah membangun sikap kepercayaan sosial atau *social trust* di antara sesama kelompok politik terhadap masyarakat (Denny J.A, 2006: 232). Kepercayaan sosial ini berguna untuk meluaskan budaya demokrasi dan memantapkan kebijakan yang efektif.

Substansi demokrasi yang dibawa oleh Gus Dur adalah membangun kepercayaan masyarakat secara horizontal (kemajemukan masyarakat) dan vertikal (kelembagaan). Indonesia akan sulit keluar dari krisis apabila kepercayaan masyarakat terlalu rendah dan justru saling curiga. Lembaga dan kelompok politik tidak akan mampu merancang dan mewujudkan program pembangunan apabila di antara mereka sendiri atau dengan masyarakat masih sering terjadi kerusuhan. Kerusuhan dan kecurigaan ini semakin menajam atas dasar mekanisme pengangkatan presiden itu sendiri yang menengahkan masalah *gender* dan sekaligus reputasi Gus Dur yang berangkat sebagai tokoh Islam. Ia harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa apa yang sedang direncanakan pemerintah ialah murni untuk memajukan demokrasi dan perekonomian, bukan sebuah penyingkiran kelompok agama lain dari kancah politik.

3.2.1.5 Demokrasi pada kepemimpinan Megawati

Saat Megawati diangkat menjadi presiden, ia memperkenalkan dua visinya dalam bidang ekonomi dan politik. Visi Megawati di bidang ekonomi adalah menumbuhkan perekonomian rakyat. Elit politik yang bermain di sini adalah kaum yang memihak pada rakyat kecil atau '*wong cilik*', yang terdiri dari: buruh, petani, rakyat pedesaan, dll. Pemerintah dijadikan alat untuk menggantungkan dan mengangkat kehidupan rakyat kecil. Peran pemerintah antara lain: memberikan subsidi kepada pengusaha kecil dan menengah serta melakukan kebijakan perlindungan atau *protection* terhadap produk dan modal asing. Dari sisi ekonomi, Megawati menghidupkan semangat reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa

dalam gerakan sosial untuk menjatuhkan Soeharto, sebab praktik KKN adalah akibat dari perekonomian yang hanya berpusat di kalangan elit pemerintahan saja (Denny J.A, 2006: 208-209).

Visi politik Megawati adalah mencabut dwifungsi militer. Demokrasi harus bisa memisahkan peran para pengambil kebijakan politik dengan pelaksana kebijakan politik. Pengambil kebijakan politik bertanggung jawab penuh atas pilihan kebijakannya karena konsekuensi kebijakan itu langsung mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. Pelaksana kebijakan tidak berpolitik, mereka hanya alat bagi pengambil kebijakan politik. Posisi militer dan pegawai negeri adalah pelaksana dan alat kebijakan politik. Jasa mereka harus netral karena akan digunakan oleh siapapun yang memenangkan pertandingan politik.

Satu-satunya kekurangan Megawati adalah soal kekuatan konseptual. Ia kurang memiliki kecakapan individu dalam menghadapi debat terbuka dengan para pesaingnya. Kapasitas seorang pemimpin dalam kefasihan berdebat, kekuatan konsep dan retorika, serta kekayaan intelektual akan terlihat dalam debat terbuka itu. Apalagi dengan gaya kepemimpinannya yang lebih banyak diam, semakin mencuatkan bahwa Megawati bisa naik menjadi presiden hanya karena citra dari Soekarno serta kemampuan PDIP dalam menjalin koalisi, bukan faktor kekuatan pribadi Megawati sendiri.

Substansi demokrasi pada kepemimpinan Megawati yang berusaha untuk memajukan kehidupan rakyat kecil namun tidak dibarengi dengan komunikasi politik membuat masyarakat menjadi bingung untuk menginterpretasikan maksud dari kebijakannya. Masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan atas apa yang tengah terjadi dan mengapa pemerintah mengambil kebijakan tertentu. Akibatnya publik mengembangkan opininya sendiri sesuai dengan apa yang secara nyata mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

3.2.1.6 Demokrasi pada kepemimpinan SBY

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY diangkat menjadi presiden melalui pemilu tahun 2004 yang dianggap sebagai pemilu paling jujur, adil, dan demokratis sepanjang sejarah bangsa. Ada banyak perubahan dalam tubuh perundang-undangan dan peraturan presiden yang terlihat semakin demokratis.

Pemerintahan SBY merupakan pemerintahan pertama dalam sejarah Indonesia yang memulai sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Di sini, MPR tidak lagi berwenang untuk menetapkan program pemerintahan lima tahunan kepada suatu pemerintahan karena presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi langsung dipilih oleh rakyat. Pedoman program pemerintah lima tahunan dan RPJPN cukup ditetapkan melalui Peraturan Presiden oleh presiden yang bersangkutan. Hal ini membuat presiden memiliki pertanggungjawaban yang penuh atas program-program dan janji-janjinya di dalam kampanye partai dan pemilu. Tingkat keberhasilan seorang pemimpin bisa dilihat dan dievaluasi secara transparan oleh semua kalangan, sekaligus menjadi modal untuk kembali mencalonkan diri di pemilu selanjutnya (“Demokrasi SBY”).

Demokrasi di Indonesia merupakan jawaban terhadap *skepticism* perjalanan kepemimpinan dan pemerintahan di negeri ini. Nada *skeptic* itu merupakan pandangan yang menganggap bahwa demokrasi yang benar-benar kritis akan membawa situasi yang kacau dan perpecahan. Akan tetapi demokrasi yang dijalankan SBY menunjukkan bahwa masyarakat yang majemuk juga bisa hidup berdampingan. SBY menyadari bahwa bentrokan yang terjadi di masyarakat adalah dampak dari krisis keuangan. Ia meminta kepada rakyat dalam menghadapi krisis global untuk terus optimis, bersatu, bersemangat, dan tetap tanggap untuk menangkap peluang perdagangan dan kerjasama ekonomi. SBY juga memerintahkan untuk memperbaiki fundamental keuangan dan ekonomi makro, terbukti dengan dicanangkannya tahun 2009 sebagai zaman industri kreatif yang banyak melibatkan usaha kecil dan menengah (“Demokrasi SBY”).

SBY memberi perubahan besar terhadap corak kemasyarakatan di Indonesia. Kini Indonesia benar-benar memiliki seorang pemimpin yang demokratis. Ia mengutamakan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini adalah keberhasilan SBY dalam memimpin bangsa, di mana ia mampu untuk menciptakan demokrasi di tengah krisis dan di dalam keragaman budaya. Maraknya aksi protes yang terjadi belakangan ini memang tidak dapat dihindari, namun SBY melihat itu sebagai langkah-langkah pembelajaran bagi masyarakat demokrasi. Ia membuktikan komitmennya dalam

berdemokrasi melalui pemberantasan korupsi, terbukti dengan banyaknya pejabat tinggi negara yang disidang karena melakukan tindak pidana korupsi. Inilah substansi demokrasi yang dibawa SBY, yaitu pentingnya demokrasi yang benar-benar mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan rakyat. Ia telah mampu untuk menciptakan mental masyarakat yang demokratis dengan terus melakukan dialog. SBY bahkan menganjurkan kepada publik untuk selalu mengkritik kebijakan pemerintah, sebab kritik adalah esensi dari demokrasi.

3.2.2 Peran Kelas Menengah di Indonesia

Bila berbicara mengenai gerakan demokrasi suatu negara, maka tidak bisa terlepas dari peran kelas menengah negara tersebut. Kelas menengah adalah kelompok sosial dalam masyarakat yang terdiri dari pengusaha, kaum terpelajar, kelompok *professionals*, mahasiswa, politisi, dan tokoh pers. Pentingnya peran kelas menengah dalam demokrasi Indonesia karena kemampuannya merumuskan ideologi¹² dan kemampuannya membuat jaringan kerja dalam rangka mengejar kebutuhannya (Denny J.A, 2006: 63).

Bila ada kelas menengah maka akan ada kelas atas dan bawah. Kelas atas adalah kalangan elit negara. Kalangan elit ini adalah segelintir orang yang memiliki jabatan politik, kekuasaan, keuangan, jaringan organisasi, atau pengetahuan yang sangat mempengaruhi dan menentukan arah dan tujuan negara. Sebagian dari kelas atas ini ada yang duduk di pemerintahan. Opini, keputusan, dan kepentingan mereka sangat diperhitungkan. Mereka adalah sekelompok orang yang memiliki *bargaining position*¹³ yang kuat. Kelas atas adalah kalangan orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, ditandai dengan pendidikan yang tinggi dan kekayaan materi.

Fungsi kelas menengah bagi kelas atas atau kaum elit negara adalah sebagai kritikus dalam berkuasa. Kecenderungan bagi setiap orang yang berkuasa adalah melakukan kesewenang-wenangan di dalam menggunakan kekuasaannya. Kaum elit yang berkuasa dan berwawasan luas tentunya hanya akan dapat dikoreksi oleh orang yang berwawasan luas pula. Di sinilah peran kelas menengah. Kelas menengah akan menjadi sebuah kekuatan yang selalu

¹² Ideologi di sini berupa gerakan yang melegitimasi ataupun menolak sistem yang berlaku.

¹³ Kedudukan dan kekuatan dalam tawar-menawar untuk melancarkan kepentingan.

mengoreksi dan mengkritisi kelas atas. Bila ada kebijakan atau tindakan kelas atas yang tidak sewajarnya maka kelas menengah akan melakukan suatu gerakan yang menuntut perubahan. Tuntutan-tuntutan inilah yang merupakan dialog demokratis antara masyarakat dengan pemerintah.

Kelas bawah adalah golongan masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam perkembangan bernegara dan berdemokrasi. Kalangan ini tidak memiliki kemampuan yang benar-benar bisa diperhitungkan dalam mempengaruhi kelangsungan hidup berpolitik dan berdemokrasi, sebab mereka tidak memiliki minat, bakat, dan *bargaining position* yang kuat. Kalangan ini biasanya berasal dari kaum pengusaha kecil, pegawai, buruh, dan pengangguran. Mereka adalah kalangan yang sangat peka terhadap gejolak finansial, karena penghasilan mereka yang kurang mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kelas ini lebih sering dianggap sebagai 'alat' yang bisa digiring 'ke sana-ke mari' oleh kalangan elit. Alhasil, masyarakat kelas bawah ini bisa melakukan apa-pun yang demi 'iming-iming' yang dijanjikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat kelas bawah adalah sekelompok orang yang terasing dari hasil pekerjaannya, dari sesama kaumnya, dan dari sisi kemanusiaannya (Van Der Weij, 2000: 114).

Fungsi kelas menengah bagi masyarakat kelas bawah adalah sebagai *motivator* terhadap kondisi kehidupan masyarakat kelas bawah. Demokrasi hanya bisa dijalankan oleh negara yang memiliki jumlah kelas menengah yang banyak, sebab kelas menengah-lah yang bisa menjadi *agent* gerakan perubahan sosial. Demokrasi tidak akan tercapai bila terlalu banyak masyarakat kelas bawah. Kurangnya faktor kemandirian dalam berpolitik pada kelas bawah tidak bisa menjamin tumbuhnya iklim demokrasi yang baik. Maka dari itu, kelas menengah berfungsi sebagai pemicu semangat bagi kelas bawah agar mereka bisa terlepas dari belenggu kehidupan yang tak menentu dan menaikkan taraf hidup mereka sendiri. Taraf hidup yang baik membuat masyarakat menjadi lebih mandiri, *tolerant*, dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak mana-pun.

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, kelas menengah belum berperan nyata dalam perubahan sosial-politik. Kelas menengah belum berperan dalam demokrasi di Indonesia karena terkait dengan orientasi politik yang dianut

oleh kelas itu. Kesadaran sosial dan politik kelompok menengah ini tipis, sehingga sulit untuk mengharapkan mereka menjadi penggerak demokrasi. Kelas menengah di Indonesia mengidentifikasi diri dengan masyarakat kelas atas yang pada dasarnya selalu berupaya mempertahankan *status-quo*¹⁴ (Denny J.A, 2006: 62).

Pola pikir kelas menengah mempengaruhi peran politik mereka. Ada pertanyaan yang belum terjawab di sini, yaitu: “Mengapa pola pikir kelas menengah di Indonesia saat ini begitu terisolasi bila dibandingkan pada zaman kolonial yang justru tersosialisasi dan sangat berpartisipasi dalam perubahan sosial?” Jawaban yang tepat adalah dengan memasukkan satu faktor penting yaitu peran aktif dan kemampuan negara untuk mengintegrasikan kelas menengah, sehingga membuatnya lebur dalam dinamika dan pengendalian negara. Pengendalian oleh negara ini dapat dilihat melalui dua fenomena negara Indonesia pada zaman kolonial yang gagal dan pada zaman Orba sampai sekarang yang berhasil.

Negara kolonial telah gagal mengintegrasikan kelas menengah pribumi ke dalam pengendalian negara. Inilah yang menyebabkan kelas menengah mengambil peran sejati sebagai kekuatan anti-sistem yang mendorong perubahan dan pencarian alternatif. Kegagalan negara kolonial ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, ketidakmampuan birokrasi kolonialisme dan perusahaan masyarakat swasta saat itu untuk menampung kaum terpelajar pribumi yang telah terdidik dan mengerti akan hak-haknya. Mereka menjadi kelompok yang bebas namun gelisah, karena tidak memperoleh pekerjaan dan di sisi lain telah tercerabut oleh akar tradisi akibat pendidikannya. *Kedua*, kaum pribumi merasakan diskriminasi kolonial, baik dalam posisi politik dan ekonomi maupun *access* pada kebudayaan modern secara rasialis. Negara mendudukan bangsa Belanda dan Eropa lainnya di puncak strata, bangsa Cina dan Asia lainnya di strata tengah, sedangkan pribumi adalah yang terbawah. Akibat *marginalization* ini, kelas menengah pribumi kemudian melakukan politisasi terhadap kegelisahannya. Mereka menjadi sebuah kekuatan pengubah tatanan kolonial dengan masuknya ideologi nasionalisme (Denny J.A, 2006: 63).

¹⁴ Keadaan yang tetap pada suatu saat tertentu.

Ketidakmampuan negara kolonial untuk mengintegrasikan kelas menengah pribumi ke dalam pengendalian negara menyebabkan perlawanan yang digalang oleh kelas menengah itu sendiri. Di kalangan kelas menengah itu kemudian berkembang semangat dan pemikiran-pemikiran seperti: demokrasi, sebagai antitesis terhadap negara kolonial yang anti-demokrasi dan feodalistik; nasionalisme dan patriotisme, sebagai antitesis negara kolonial dan penjajahan; rasa solidaritas sosial yang tinggi akibat dari kesamaan nasib sebagai orang yang terjajah.

Gagasan demokrasi pada mulanya lahir melalui penghadapan antara cita-cita dan realitas, di mana ia merupakan suatu struktur makna dari perilaku dan perbuatan. Ide demokrasi bertolak dari kesadaran akan perlunya corak masyarakat yang 'wajar' bagi pribumi. Tindakan yang dilatarbelakangi oleh keinginan mengangkat harkat dan martabat manusia pribumi ke tingkat yang 'wajar' itu lebih muncul ke permukaan dibandingkan penggunaan istilah dan definisi demokrasi itu sendiri. Sikap demokratis dan usaha-usaha untuk mengembangkan ide demokrasi tidak dimulai dari kata-kata tetapi tercermin dalam sebuah tindakan yang bermula dari kesadaran atas situasi diri yang terjajah. Demokrasi di Indonesia tumbuh dari keprihatinan yang mendalam terhadap nasib bangsa Indonesia yang tertindas. Hal ini terlihat dalam usaha Serikat Islam di Semarang yang mendirikan Sekolah Rakyat, sekolah bagi rakyat jelata yang pada hakikatnya merupakan bagian dari cita-cita persamaan derajat dan pemenuhan hak dasar yang dikehendaki dalam gagasan demokrasi (Haris, 1995: 27-28).

Di era Orba, fungsi-fungsi negara telah mampu untuk mengintegrasikan kelas menengah ke dalam pengendalian negara. Kelas menengah akhirnya telah menyatukan diri dalam rekayasa sosial besar, di mana negara itu sendiri yang menjadi penggerak utama. Pengaruh yang ditimbulkan pada kelas menengah adalah perubahan pola pikir mereka terhadap negara. Cara pandang mereka berubah mengikuti cara pandang yang direpresentasikan oleh Orba. Kelas menengah berada dalam kendali negara. Hal ini dapat dipahami mengingat stabilitas politik sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi. Mengendalikan stabilitas berarti mengendalikan kelas menengah, sebab

bila tidak demikian maka apa yang terjadi pada zaman kolonial akan terulang lagi – kelas menengah membangun gerakan anti-sistem (Denny J.A, 2006: 64).

Selanjutnya, negara membentuk badan-badan mekanisme pengendali kelas menengah itu. Badan-badan tersebut antara lain: kaum pengusaha diintegrasikan negara melalui Kamar Dagang Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, serta melalui perizinan usaha; tokoh pers diintegrasikan negara melalui Persatuan Wartawan Indonesia; dan kaum intelektual diintegrasikan melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Berbagai organisasi ini keberadaannya sangat tergantung dari dukungannya atas sistem yang dikendalikan negara. Maka dari itu, dalam kondisi yang terkendali seperti ini, walaupun nantinya jumlah kelas menengah di Indonesia meningkat, tetap saja tidak secara langsung dapat memperkuat gerakan anti-sistem. Kelas menengah hanya memberi *response* mengikuti dinamika negara. Kelas menengah sudah tidak bisa menjadi *agent* demokrasi di Indonesia. Lemahnya posisi kelas menengah mempengaruhi corak negara, akibat ketidakmandirian politik.

3.2.3 Mobilisasi Sosial Masyarakat di Indonesia

Di Indonesia saat ini sudah semakin banyak ruang publik. Hal ini tentunya akan berakibat pada proses mobilisasi sosial yang semakin gencar. Mobilisasi sosial sebagai proses perubahan menyeluruh, baik dalam segi ekonomi, psikologi masyarakat, maupun organisasi. Perubahan itu disebabkan oleh: penyelenggaraan pendidikan, pembangunan ekonomi, kehadiran media massa, urbanisasi, perubahan pekerjaan dari sektor agraris ke sektor industri, hadirnya barang-barang konsumsi, mesin-mesin berteknologi dan gedung, serta kemajuan organisasi militer. Semakin gencar mobilisasi unsur-unsur ini maka semakin besar pengaruhnya kepada masyarakat setempat (Denny J.A, 2006: 76).

Melalui unsur-unsur tersebut, ada dua macam implikasi akibat mobilisasi sosial, yaitu: *Pertama*, tumbuhnya kebutuhan masyarakat akan partisipasi politik yang lebih besar. Masyarakat semakin butuh untuk turut menentukan hidupnya sendiri, bahkan ikut mempengaruhi dunia publik akibat semakin terbukanya wawasan, daya pikir kritis, dan kemampuan finansial. *Kedua*, keharusan

pemerintah untuk terus mengembangkan dirinya guna memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Corak pemerintahan yang lama sebelum adanya mobilisasi sosial dipandang sudah tidak memadai lagi untuk menjawab tantangan zaman. Jadi, teori ini mengandaikan mobilisasi sosial akan berujung pada demokrasi politik.

Mobilisasi sosial ini terjadi di Indonesia sejak zaman Orba hingga kini. Di Indonesia telah terjadi pembangunan ekonomi, penerapan pendidikan akademis yang bermutu, dan penggiatan media massa yang dimobilisasi dengan gencar. Hal ini berakibat pada masyarakat Indonesia yang semakin butuh akan partisipasi politik. Di dalam masyarakat Indonesia yang sangat plural, kepentingan berpartisipasi itu lebih besar karena kepentingan satu *segment* masyarakat tidak dapat diwakili oleh *segment* masyarakat yang lain. Tumbuhnya berbagai organisasi baru, baik yang berlatar belakang politik maupun bukan berlatar politik secara langsung (ideologi, budaya, suku, agama, dll.) yang terjadi sekarang ini, adalah konsekuensi dari terjadinya mobilisasi sosial.

3.2.4 Agama dalam Demokrasi di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut konsep demokrasi. Konsep demokrasi ini akan lebih mantap kedudukannya apabila dijalankan dalam ranah yang sekuler. Melalui pandangan ini, ada sebuah kritik dari H.A. Sumargono tentang ketidaksetujuannya pada aplikasi politik sekuler dalam demokrasi Indonesia. Ia beranggapan bahwa negara yang netral dan tidak memihak pluralitas agama warganya hanya ada di angan-angan. Dalam bahasanya sendiri, H.A. Sumargono berkata: “Pengalaman sejarah menunjukkan, bahwa ide sekulerisme dan lain-lain lebih merupakan trik politik, agar umat (Islam) tidak peduli dan jauh dari agamanya.” (Denny J.A, 2006: 167).

Di sini H.A. Sumargono telah melupakan satu kenyataan, yaitu bahwa benar semua negara demokrasi adalah negara sekuler, namun tidak semua negara sekuler adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi yang sekuler, kehidupan beragama tetap dilindungi karena ia bagian dari hak asasi yang merupakan satu unsur dari definisi demokrasi itu sendiri, dibandingkan negara otoriter ataupun negara yang berbasis agama. Perlindungan negara demokrasi

sekuler atas kebebasan dan kesetaraan beragama bukan hanya angan-angan saja, seperti yang diduga H.A. Sumargono. Di negara demokrasi sekuler, tidak hanya agama mayoritas yang memiliki hak untuk menduduki jabatan publik tertinggi; agama minoritas-pun demikian. Di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan sudah pernah memiliki presiden yang beragama Katolik, yaitu John F. Kennedy

Tidak ada satu-pun negara demokrasi sekuler yang menghilangkan sentimen agama dalam politik, sebab tindakan seperti itu akan bertentangan dengan HAM. Demokrasi sekuler memberikan hak pada warga negara dalam menggunakan ideologi, agama, atau persepsinya sendiri dalam kancah politik. Maka dari itu, menghilangkan sentimen agama dalam politik adalah hal yang tidak perlu. Apa yang dilarang dalam prinsip negara demokrasi sekuler adalah menggunakan negara untuk menjadi *instrument* agama tertentu. Hal ini dilarang karena melanggar netralitas dan menghilangkan kesamaan perlakuan negara atas pluralitas agama. Prinsip ini dibangun berdasarkan kesadaran bahwa negara adalah proyek bersama. Semua warga negara, apapun agamanya, rasnya, jenis kelaminnya, dan warna kulitnya, memiliki hak sosial-politik yang sama. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan penegakan demokrasi sekuler, sebab hak mempraktikkan agama dijamin sepenuhnya oleh negara. Peran masyarakat sebagai struktur sosial yang baik dapat menciptakan kemandirian beragama dalam berdemokrasi.

3.3 Kegagalan Demokrasi di Indonesia

Awal dari *millennium* ketiga ini ditandai dengan pembalikan transisi demokrasi. Beberapa negara berkembang yang semula menunjukkan prospek berubah menuju negara demokrasi, kini telah gagal di tengah jalan. Kegagalan tersebut membuat negara yang bersangkutan kembali ke sistem yang lama yang otoritarian, atau menjadi sistem yang rapuh yang tidak otoriter namun tidak pula demokratis. Kegagalan ini pula yang dikhawatirkan terjadi di Indonesia. Krisis yang ada kini sudah multidimensi, antara lain: konflik kaum elit dengan lembaga tinggi pemerintah berupa ancaman kekerasan, konflik massa secara *horizontal*, dan terpuruknya ekonomi.

Terdapat tiga *variable* persyaratan yang diajukan oleh para ahli politik di bidang demokrasi. Ketiga *variable* ini amat menentukan kelangsungan demokrasi sebuah negara. Bila ketiganya tidak dalam kondisi baik, maka negara itu akan mengalami keadaan yang carut-marut. Ketiga hal inilah yang tidak didapat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu: (a). pertumbuhan ekonomi, (b). budaya liberal, dan (c). kesepakatan di kalangan elit negara (Denny J.A, 2006: 184-186).

3.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan di setiap lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketersediaan dana yang cukup sebagai akomodasi politik. Pertumbuhan ekonomi memberikan keleluasaan pada pemerintah untuk menyubsidi masyarakat bawah – yang sangat mudah diradikalisir – agar mereka bisa menikmati aneka program kesejahteraan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi memberikan perasaan pertambahan kesejahteraan pada publik yang akan membuat mereka lebih nyaman dalam kehidupan sehari-hari (Denny J.A, 2006: 184).

Sebaliknya, krisis ekonomi justru mencabut aneka subsidi pemerintah yang dinikmati masyarakat luas. Naiknya harga BBM, air bersih, listrik, dan pangan; secara langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak. Krisis ekonomi akan menciptakan masyarakat yang semakin marah dan memberontak terhadap situasi. Krisis ekonomi akan menambah angka pengangguran, menurunnya kualitas pelayanan publik dari pemerintah, dan meninggikan harga bahan pokok sehingga sulit terjangkau masyarakat. Kegelisahan publik ini mudah ‘disulut’ untuk menjadi huru-hara massal oleh seorang *demagogue*¹⁵. Jadi, jika ekonomi suatu negara terus terperosok, bisa dipastikan negara itu tidak akan berhasil untuk mencapai tatanan demokrasi.

3.3.2 Budaya Liberal

Budaya liberal yaitu kebudayaan yang menanamkan cara berpikir yang luas, bebas, dan tidak picik kepada setiap masyarakatnya. Hasil dari budaya

¹⁵ Seseorang yang menggerakkan rakyat dengan cara menebar hasutan.

liberal ini antara lain adalah persamaan hak politik yang tidak memandang agama, jenis kelamin, kekayaan, dan ideologi seseorang. Budaya ini menolak diskriminasi hak politik yang didasari masalah jenis kelamin atau agama. Budaya liberal menghasilkan perilaku politik yang menghormati perbedaan pendapat. Kadar militansi politik dalam budaya liberal adalah moderat. Kritik terbuka dianggap sebagai peristiwa politik yang rutin, bahkan terhadap pemimpin tertinggi negara. Keinginan masyarakat untuk mengganti pimpinan adalah peristiwa yang biasa, namun tidak sampai membuat masyarakat itu harus berjuang mengorbankan nyawa. Ancaman kekerasan karena perbedaan kepentingan politik menjadi minimal (Denny J.A, 2006: 185).

Sebaliknya, tidak adanya budaya liberal pada masyarakat berkecenderungan memilih cara-cara politik yang militan dan radikal. Kompetisi politik menjadi pertarungan hidup dan mati, baik mengatasnamakan individu maupun kelompok tertentu. Banyak orang yang berani menyangung nyawa hanya untuk perkara pergantian kekuasaan. Akibat militansi itu, ancaman kekerasan dan huru-hara massal selalu mewarnai proses politik. Tidak adanya budaya liberal memicu konflik *horizontal* yang berlandaskan agama dan etnis. Kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik tidak akan berlangsung secara *equal* bila hanya didukung oleh kelompok yang fanatik kepada agama atau suku tertentu.

Sebelum jatuhnya rezim Orba di tahun 1998, konflik horizontal sudah kerap terjadi. Akan tetapi, di zaman politik yang otoriter, aneka konflik horizontal itu dapat ditekan secara represif. Rezim Orba memperkenalkan istilah SARA¹⁶ yang dilarang untuk dipercakapkan secara publik. Kaum elit yang berpengaruh di setiap golongan primordial dan daerah telah dikooptasi oleh kekuasaan otoriter, baik itu berupa *punishment*¹⁷ maupun *reward*¹⁸.

Gerakan reformasi membuat kekuasaan otoriter yang tersentralisasi itu hancur. Kini, tidak ada lagi kekuasaan sentral yang represif yang mampu mengendalikan segenap lapisan masyarakat. Berbagai konflik *horizontal* tampil ke permukaan. Kekuatan polisi dan militer sudah lumpuh dan kalah oleh kekuatan massa. Inilah sisi tragis Indonesia dalam rangka demokrasi. Kebebasan yang

¹⁶ Suku, agama, ras, dan antara golongan.

¹⁷ Sanksi hukuman berupa ancaman penjara, teror, fisik, kedudukan, dll.

¹⁸ Ganjaran hadiah berupa uang, jabatan, keamanan, dll.

diberikan menjadi *boomerang* yang membahayakan kebebasan itu sendiri. Jalan menuju demokrasi diwarnai oleh berbagai peristiwa yang dapat menghancurkan demokrasi. Tingkat kepuasan publik atas suasana reformasi semakin menurun. Sebagian publik kembali merindukan stabilitas dan kesejahteraan yang didapat pada rezim Orba.

Negara yang sedang memulai mobilisasi sosial banyak yang mengalami guncangan kerusuhan dan kudeta. Mobilisasi sosial pada akhirnya tidak memberikan negara pada masyarakat demokrasi, melainkan jatuh kepada sistem non-demokratis, seperti: rezim militerisme, birokrat otoritarian, dan diktatorial. (Denny J.A, 2006: 76).

Ancaman nyata kini telah di depan mata. Konsolidasi demokrasi yang merupakan cita-cita reformasi, yang telah mengorbankan ratusan nyawa beserta kerugian materi yang tidak terhitung jumlahnya, kini nyaris runtuh. Contoh kasus runyamnya demokrasi di Indonesia adalah peristiwa demonstrasi yang bersifat *anarchist* di Medan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009. Unjuk rasa ini menuntut DPRD Sumatera Utara untuk segera membentuk propinsi yang baru, yaitu Tapanuli. Peristiwa ini mengakibatkan korban jiwa yaitu Ketua DPRD Sumatera Utara yang bernama Abdul Azis Angkat. Komisaris Jenderal Polri Susno Duadji berkata: “Dengan adanya peti mati, dengan adanya tulisan ‘kalau tidak begini mati’, dengan adanya spanduk bertuliskan ‘Ketua DPRD harus mati’, apa masih belum jelas itu direncanakan?” (Otak Anarkisme Kena Pasal Pembunuhan, *Kompas*, Jumat, 13 Februari 2009: 24).

3.3.3 Kesepakatan di Kalangan Elit Negara

Setiap negara pasti mempunyai lapisan kelas elit yang minoritas, namun sangat berpengaruh. Pengaruh mereka bisa berupa jabatan politik, uang, jaringan organisasi, atau pengetahuan. Jika para elit ini bisa saling bersepakat satu sama lain, maka stabilitas politik akan terjamin. Program yang telah direncanakan untuk menuju negara demokrasi akan lebih mudah dilaksanakan. Kesepakatan penting yang dihasilkan oleh para elit adalah tentang aturan main dalam berpolitik. Walaupun nantinya pasti ada kompetisi yang terjadi di antara mereka, namun dengan aturan yang rinci dan tegas yang sudah disepakati bersama – misalnya

konstitusi – maka mereka akan tunduk pada aturan itu. Bila ada perbedaan interpretasi atas aturan berpolitik itu maka ada lembaga yang melakukan *arbitration* (penengah) yang sudah mereka sepakati (Denny J.A, 2006: 186).

Lawan dari kondisi ini adalah konflik antara elit yang berkepentingan. Kaum elit yang saling bertikai satu sama lain itu tidak lagi menyepakati tentang aturan dalam berpolitik. Perbedaan interpretasi dalam aturan berpolitik akan menuju kebuntuan karena tidak ada lembaga yang disepakati bersama yang dapat menengahi pertikaian interpretasi itu. Ketidakpastian aturan berpolitik dan konflik antara elit dengan mudah mengguncang-guncang stabilitas pemerintahan.

Gagasan demokrasi di Indonesia muncul pertama kali atas dasar dari keinginan kelas menengah untuk menyamakan status sosial pribumi, akibat penjajahan dan penindasan oleh kolonialisme. Kelas menengah adalah ‘motor’ penggerak yang aktif sebagai pencetus demokrasi Indonesia. Kelas menengah bisa menjadi pelopor demokrasi karena mereka diasingkan, namun tidak dimasukkan dalam pengendalian negara. Akibatnya, kelas menengah yang merasa kecewa itu melakukan gerakan yang melawan pemerintah kolonialisme. Dari sinilah awal mula ide demokrasi di Indonesia.

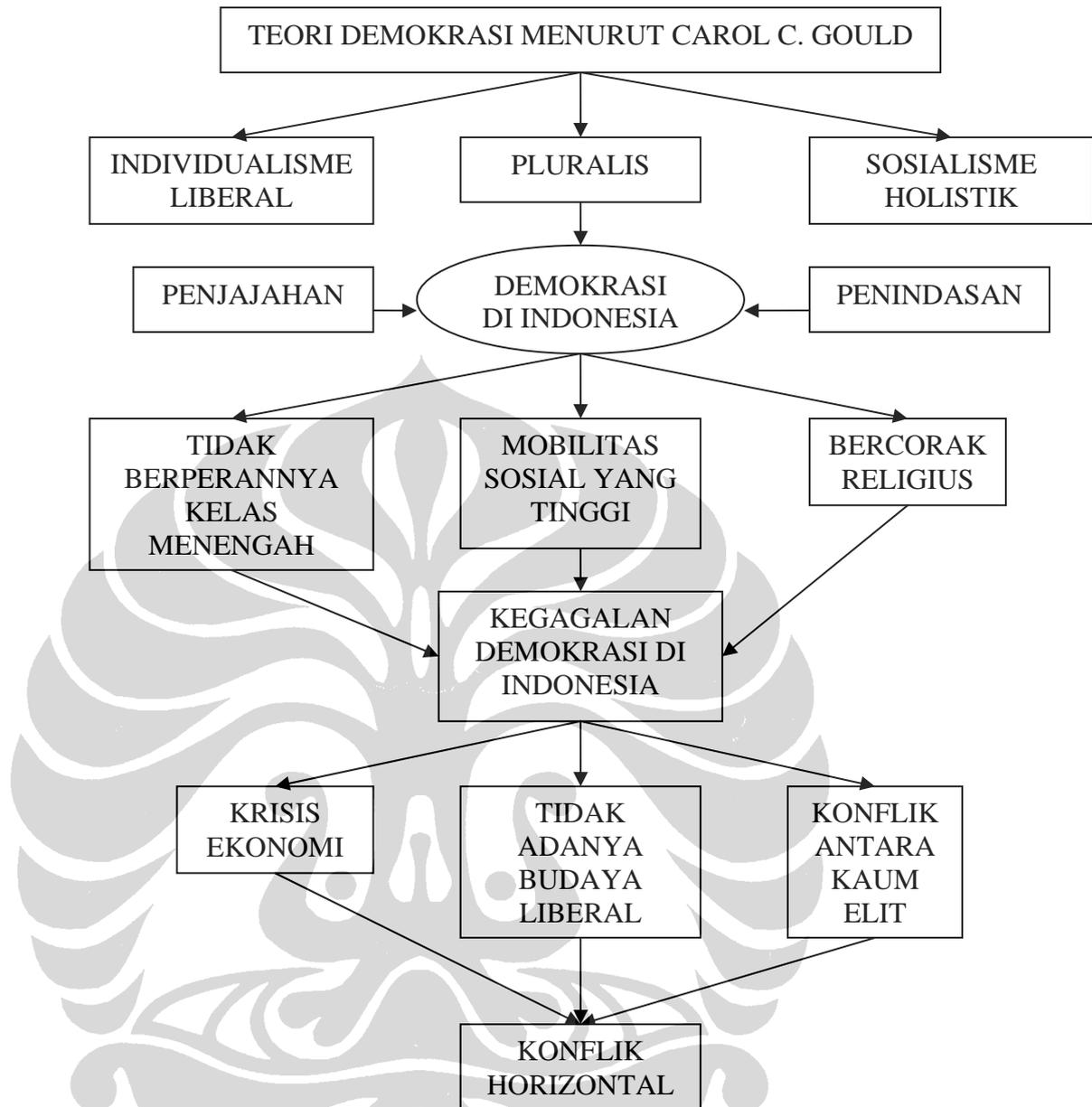
Kini, kelas menengah tidak lagi dikucilkan oleh pemerintah. Mereka telah diperhatikan dan dimasukkan dalam wadah-wadah sosial milik negara. Akibatnya, semangat-semangat pemberontakan dari kelas menengah yang mengkritisi pemerintah semakin berkurang. Kelas menengah sudah tidak mengidentikkan diri sebagai kaum perintis tetapi kelas atas yang mempertahankan *status-quo*.

Tidak berfungsinya peran kelas menengah di Indonesia maka negara sudah tidak memiliki ‘kritikus’ lagi di dalam menjalankan kekuasaannya. Ini adalah salah satu faktor gagalnya demokrasi di Indonesia. Kelas menengah yang terdidik dan bisa menanamkan budaya liberal dalam kehidupan sehari-harinya justru tidak ambil bagian dalam demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia akhirnya diambil alih oleh kelas elit berdasarkan kepentingan dan keserakahan individu, dan kelas bawah berdasarkan *anarchism* karena kegelisahan dan kemarahannya menghadapi hidup yang semakin sulit.

Demokrasi di Indonesia bisa menerapkan teori model pluralis menurut Carol C. Gould. Teori ini meleburkan kepentingan individu ke dalam kelompok. Interaksi politik yang dihasilkan adalah interaksi antara kelompok satu dengan yang lain. Hal ini bisa diterapkan di Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman dalam suku, agama, etnis, dan partai politik. Kelompok dijadikan sebagai 'kendaraan' sosial politik bagi kepentingan individu.

Peran dari pemimpin Indonesia sejak awal masa kemerdekaan hingga sekarang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Soekarno menerapkan corak diktatorial dan terpusat, karena bangsa Indonesia belum mampu untuk mengatur dirinya sendiri. Soeharto menerapkan adalah kepemimpinan kuat dan militerisme, karena untuk mengejar ketertinggalan ekonomi. Habibie menerapkan multipartai dan desentralisasi sebagai koreksi atas sistem lama yang represif. Gus Dur menerapkan kepercayaan sosial karena masyarakat saling mencurigai satu sama lain. Megawati memihak pada rakyat kecil dan pencabutan dwifungsi militer. SBY menerapkan keterbukaan pemerintah terhadap dialog dan kritik dari masyarakat sebagai cara untuk membentuk masyarakat yang demokratis. Jadi, pemetaan demokrasi di Indonesia, dilihat dari kebijakan-kebijakan demokratis dari setiap pemimpin Indonesia, sejak Orde Lama hingga reformasi sekarang ini, adalah cara untuk membangun rakyat Indonesia.

Dari sini, aplikasi konsep Aristokrasi *Übermensch* terhadap realitas kehidupan demokrasi di Indonesia adalah sebagai suatu ajaran moral bagi masyarakat Indonesia dalam kanvas persaingan kekuasaan pada kehidupan sosial-politik. Aristokrasi *Übermensch* menanamkan suatu nilai luhur berupa kemandirian dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus pandangan yang jauh ke depan untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran lama yang telah merusak sendi-sendi kehidupan berdemokrasi.



BAGAN 3

Realitas Kehidupan Demokrasi di Indonesia

BAB 4

ANALISA ARISTOKRASI ÜBERMENSCH ATAS KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Sejak rezim pemerintahan Orde Lama hingga Orde Baru, rakyat Indonesia belum pernah merasakan semangat demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi di Indonesia baru dimulai pada zaman reformasi yang ditandai dengan berakhirnya rezim Orba di tahun 1998. Jatuhnya rezim Orba menghasilkan suatu pemerintahan transisional kepada presiden-presiden selanjutnya. Pemerintahan transisional ini belum merupakan sebuah pemerintahan demokratis yang kuat. Indonesia baru bisa dikatakan sebagai negara demokrasi yang baik ketika telah berhasil menyelenggarakan pemilu di tahun 2004 dan menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai presiden RI ke-6.

Bab 4 ini terbagi menjadi dua subbab, yaitu: hambatan proses demokratisasi di Indonesia dan kritik Aristokrasi Übermensch terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang keterkaitan antara konsep aristokrasi Übermensch dengan fenomena kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

4.1 Hambatan Proses Demokratisasi di Indonesia

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah sebuah peristiwa yang penuh dengan penindasan. Bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun. Bangsa Jepang juga pernah menjajah Indonesia selama 3 setengah tahun. Penjajahan membuat rakyat Indonesia menjadi bodoh dan tidak berdaya. Bangsa Indonesia dianggap sebagai bangsa budak yang lemah dan tidak memiliki harga diri. Maka dari itu, bangsa Indonesia merasa harus mampu untuk memerdekakan diri dari penjajahan serta menaikkan derajat bangsa. Satu-satunya jalan untuk menaikkan derajat bangsa Indonesia adalah dengan kehidupan demokrasi, agar kedudukan rakyat Indonesia di mata dunia menjadi setara.

Di subbab ini, penulis akan menjelaskan alasan filosofis tentang ketidaklancaran proses demokratisasi di Indonesia. Alasan tersebut antara lain: (a). Kekuasaan yang bersifat *backward-looking*, dan (b). Ketidakmampuan masyarakat untuk memberontak dari sistem.

4.1.1 Kekuasaan yang Bersifat *Backward-looking*

Pada awal kemerdekaan, Indonesia dikuasai oleh sebuah rezim yang disebut Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Selama tahun 1945-1949, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Parlementer, yang pada akhirnya sistem ini dianggap terlalu liberal dan tidak mencerminkan kepribadian bangsa (Haris, 1995: 8). Selanjutnya diberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin, namun sistem demokrasi ini samasekali tidak demokratis dan cenderung otoriter. Kritik dan pemikiran yang berbeda dengan Soekarno langsung dianggap sebagai musuh dan penghalang, sehingga siapa saja yang mencoba melakukannya akan ditindas atas nama ketertiban dan stabilitas negara. Jadi, rezim Orla juga tak ubahnya sebagai sebuah penindasan. Demokrasi Terpimpin ini bertahan hingga tahun 1965 (Haris, 1995: 12). Sejak itu, berakhirilah rezim Orla yang dipimpin oleh Soekarno.

Rezim selanjutnya adalah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sistem demokrasi yang diterapkan Soeharto adalah Demokrasi Pancasila. Sistem ini dianggap sebagai *total correction* atas penyimpangan-penyimpangan sistem demokrasi pada masa-masa sebelumnya (Syamsuddin Haris, 1995: 9). Sesungguhnya, Demokrasi Pancasila ini hanya 'kedok' bagi pemerintah untuk melaksanakan praktik KKN dalam mekanisme kekuasaan. Sistem ini hanya sebagai pemantap rezim Orba yang otoriter dan militeristik. Konsekuensi logis dari pemerintahan yang otoriter terhadap masyarakat adalah tidak adanya kebebasan berekspresi dalam kehidupan sosial-politik – walaupun stabilitas negara terjamin dalam hal keamanan dan ketertiban. Bagaimanapun juga, sebuah kekuasaan yang menindas rakyat bukanlah penerapan demokrasi yang benar. Rezim Orba telah membatasi ruang gerak sosial-politik rakyat Indonesia. Maka dari itu, rezim Orba – seperti halnya juga Orla – merupakan praktik penindasan terhadap bangsa Indonesia.

Soeharto, sebagai pusat kekuasaan rezim Orba, selama 32 tahun telah membuat para birokrat dan pemegang kekuasaan yang lain menjadi memiliki ketergantungan tinggi kepadanya. Ketergantungan ini melemahkan penegakan hukum terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum tidak pernah terjadi secara netral dan sungguh-sungguh. Kekuasaan yang terpusat pada Soeharto membuat penegakan hukum menjadi 'tebang-pilih'. Bila

pusat kekuasaan menyatakan untuk menghentikan proses hukum maka hukum-pun tidak berfungsi. Hukum bisa ditegakkan kalau ada kekuasaan untuk menegakkannya (Oetama, 2001: 96). Keadaan demikian terus dipelihara sampai akhirnya mengarah kepada terbentuknya kroni yang *loyal* pada Soeharto.

Gerakan reformasi ingin meruntuhkan apa yang telah dibangun oleh Soeharto selama 32 tahun. Reformasi menuntut adanya kebebasan dan keadilan dalam berdemokrasi. Turunnya Soeharto dari jabatan presiden maka akan memutus jaringan KKN di dalam pemerintahan. Semua kroni Soeharto yang tersebar di seluruh jajaran pemerintahan dan birokrasi secara praktis akan kehilangan wewenang dari pusat kekuasaan itu. Hal ini diharapkan akan membuat Indonesia menjadi lebih baik dalam menegakkan hukum. Cita-cita demokrasi, berupa kebebasan dan keadilan, lebih mungkin tercapai di era reformasi ini. Rakyat Indonesia sudah bisa menentukan nasibnya sendiri.

Era reformasi adalah zaman berakhirnya kekuasaan yang otoriter di Indonesia. Kini, cita-cita bangsa yang telah lama dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia untuk memiliki negara yang bebas dan demokratis sudah terbuka. Demokrasi mulai terlihat melalui mobilisasi sosial-politik yang digencarkan oleh masyarakat Indonesia. Demokrasi di Indonesia ditandai oleh kegiatan-kegiatan antara lain: kebebasan pers dan media yang bebas serta vokal untuk mengkritik pemerintah, kebebasan untuk berserikat, dan masyarakat yang semakin berani untuk mengeluarkan aspirasinya. Reformasi berarti penggulingan suatu rezim yang selama ini berkuasa secara otoriter secara tidak demokratis dan tidak memihak pada kepentingan rakyat.

Tergulingnya mantan presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan tertinggi di negeri ini, menjadikan BJ. Habibie, yang waktu itu menjabat sebagai wakil presiden, memegang jabatan presiden. Presiden Habibie menerima aspirasi dan tuntutan rakyat untuk segera melaksanakan reformasi, yaitu sebuah pembentukan ulang dari segala sendi-sendi kehidupan sosial-politik. Ia memprioritaskan untuk membentuk kehidupan yang demokratis melalui sistem multipartai. Bila pada masa pemerintahan Soeharto, partai oposisi manapun tidak mungkin memenangkan kekuasaan dalam pemilu; maka di sini hak tersebut akan terakomodir.

Akan tetapi, kerugian bangsa yang paling besar saat pemerintahan Habibie adalah dengan melepasnya propinsi Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Timur sebagai propinsi yang termuda di Indonesia, yang telah diperjuangkan dengan susah-payah, dengan mudah dilepaskan begitu saja oleh kebijakan yang diambil Habibie.

Pemilu tahun 1999 menghasilkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri sebagai partai yang memenangkan pemilu, namun orang yang memegang kursi kepresidenan adalah Gus Dur. Ini merupakan sebuah ironi, karena pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang benar-benar menjamin kebebasan hak tiap-tiap rakyat, namun hasil dari tujuan itu tidak seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan pada rakyat. Naiknya Gus Dur sebagai presiden tidak melalui sistem yang baik. Mekanisme pengangkatan presiden tidak melalui cara yang demokratis, yaitu dengan menyetujui masalah jenis kelamin. Kecurigaan rakyat semakin menajam oleh karena reputasi Gus Dur yang berangkat sebagai tokoh Islam. Ditambah lagi kebijakan politik Gus Dur dengan membuat serangkaian kontroversi yang kurang populer, merusak koalisi dan hubungan baik dengan parlemen, serta memerintah semaunya sendiri

Turunnya Gus Dur dari jabatan presiden digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Kebijakan-kebijakan Megawati dalam memperbaiki kehidupan demokrasi di Indonesia adalah dengan memihak kepada rakyat kecil. Selain keberpihakan pada rakyat kecil, Megawati juga mencabut dwifungsi militer. Secara ekonomis, Indonesia telah mengalami kerugian yang cukup besar pada masa pemerintahan Megawati. Kerugian itu antara lain: penjualan gas dari Lapangan Tangguh di Papua kepada Cina dengan harga yang sangat murah dan penjualan sejumlah perbankan nasional ke pihak asing. Kepercayaan rakyat atas dirinya menjadi berkurang. Hal ini diperparah lagi dengan gaya kepemimpinannya yang lebih banyak bungkam terhadap media. Alhasil, rakyat semakin tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan atas apa yang telah diperbuat atau yang akan direncanakan oleh pemerintah.

Pemilu tahun 2004 dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu ini menghasilkan SBY sebagai pemegang

jabatan presiden selama lima tahun. SBY telah melakukan banyak perubahan di dalam tubuh pemerintah dan kehidupan sosial-politik. Ia telah menggencarkan proses demokratisasi di segala bidang kehidupan. Komunikasi antara rakyat dan pemerintah telah terakomodir dengan cukup baik.

Namun, di balik keberhasilannya, SBY telah melakukan suatu langkah kebijakan yang dianggap tidak populer di mata rakyat. Ia menaikkan harga bahan bakar minyak tanpa mempertimbangkan dampak lanjutan dari tindakan itu. Solusi dari kebijakan ini adalah dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada rakyat miskin.

Keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar tanpa pertimbangan yang matang serta dialog *interactive* dengan masyarakat bukanlah sebuah kebijakan yang demokratis. Di samping itu, pembagian BLT ini bermuatan politis. Bagi rakyat miskin, yang latar pendidikannya masih rendah, pemberian yang berwujud uang secara langsung seperti ini akan mudah diingat dan dilihat sebagai 'kebaikan' SBY kepada mereka. Hal ini akan semakin mudah bagi SBY untuk mendapatkan *simpathy* dari rakyat untuk kembali menjadi calon kuat sebagai presiden untuk periode selanjutnya.

Ini adalah perwujudan ketergantungan yang dibuat oleh penguasa kepada rakyat. Penguasa menggunakan wewenangnya untuk menindas atau membuat rakyat menderita agar lebih mudah baginya untuk membujuk hati rakyat. Penindasan dan penderitaan rakyat oleh penguasa sudah menjadi tradisi sejak bangsa Indonesia masih terjajah. Ia menggunakan kekuasaannya sebagai sarana untuk mengejar keuntungannya sendiri, bukan untuk kemajuan bangsa. Kekuasaan dan kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak adil ini akan menghasilkan kemakmuran yang timpang. Kemakmuran yang timpang hanya akan menguntungkan segelintir individu beserta kelompok-kelompoknya. Hal ini tidak ubahnya sebagai praktik KKN. Kesewenang-wenangan penguasa yang seperti ini akan memberikannya keuntungan ekonomis dan politis dari semua pihak. Oleh karena itu, setiap penguasa tentunya akan melestarikan dan mempertahankan sistem yang menindas rakyat seperti layaknya penguasa yang terdahulu. Pandangan mereka hanya tertuju pada keuntungan pribadi. Persepsi

mereka terhadap dunia diilhami oleh sistem terdahulu yang melihat ke belakang atau *backward-looking*. (Nietzsche, 1988: 215).

Rakyat Indonesia yang telah lama tertekan secara sosial-politik tentunya menginginkan sebuah negara yang menganut konsep demokrasi sesungguhnya – bukan demokrasi yang dimanipulasi oleh penguasa. Gagasan demokrasi dianggap mampu untuk menyelamatkan hak-hak masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa, sebab demokrasi adalah sebuah sistem politik di mana pengembalian kekuasaan pada tangan orang banyak atau masyarakat yang berasal-mula pada kesetaraan dan keadilan sosial. Dasar pemikiran tentang demokrasi ialah ide politis-filosofis tentang kedaulatan rakyat. Ini berarti semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subjek asli otoritas. Demokrasi memiliki potensi untuk memberikan hal yang terbaik bagi manusia, terutama dalam melindungi hak-hak individu dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang lebih perkasa, seperti kekuasaan negara dan pemerintah (Nurtjahjo, 2006: 2).

Inilah realitas konkrit sejarah kepemimpinan di Indonesia. Walaupun setiap pemimpin membawa pembaharuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi mereka tetap belum bisa untuk melepaskan diri dari sistem ‘usang’ yang mengalienasi rakyat. Demokrasi masih sebatas konsep untuk mencapai sebuah tujuan (pemilihan presiden), belum dijadikan sebagai sebuah nilai moral. Fungsi seorang pemimpin di sebuah masyarakat demokrasi bukanlah sebagai penguasa yang dapat menjalankan kekuasaan sekehendak hatinya saja, melainkan sebagai orang yang terpilih untuk mengatur dan melindungi kehidupan manusia lainnya di dalam masyarakat. Hal ini juga berlaku kepada setiap manusia di dalam masyarakat tersebut, di mana ia harus menomorsatukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi.

4.1.2 Ketidakmampuan Masyarakat untuk Memberontak dari Sistem

Secara etimologis, istilah sistem menurut bahasa Yunani, berasal dari kata *systema*, yang berarti: *syn* (bersama) dan *histanai* (untuk merancang). Jadi, sistem artinya adalah suatu rancangan atau susunan beberapa hal yang membentuk satu kesatuan organis. Di dalam struktur kemasyarakatan, sistem berfungsi untuk mengatur dan membatasi masyarakat dalam bertindak dan bertingkah-laku. Sistem

yang berlaku dalam masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai ini bisa berupa ideologi, agama, moral, tradisi, dll.

Sebagai sebuah perangkat aturan yang mengikat masyarakat, sistem mengandung nilai-nilai yang memberikan jaminan keamanan, perlindungan, dan keselamatan bagi manusia yang mengikutinya. Bagaimanapun juga, nilai-nilai seperti ini dibuat oleh orang lain. Kepentingan yang ada di dalamnya juga merupakan kepentingan orang lain. Tetap-tetapan nilai yang dibentuk oleh suatu sistem merupakan suatu penilaian yang tidak dapat dibantah.

Suatu sistem mengandaikan bahwa manusia yang berada di dalamnya tidak ada yang boleh menyimpang dari apa yang telah diatur sedemikian rupa. Manusia yang hidup di bawah sistem atau penilaian orang lain akan selalu ditunjukkan jalan yang baik dan benar oleh nilai-nilai tersebut, namun bila melanggarnya maka akan diberi sanksi. Orang yang mencari keselamatan di bawah penilaian orang lain adalah orang yang membatasi diri dalam berpikir dan bertindak. Gagasan-gagasan kaku tentang kebaikan dan keburukan adalah pemikiran kaum kawan menuju kehidupan yang aman, sunyi, dan membosankan (Stevenson, 2005: 206).

Kehidupan sosial-politik yang terjadi di Indonesia, secara disadari atau tidak, telah terperangkap di dalam sebuah sistem. Hal ini tercermin di dalam perilaku ketiga golongan masyarakat di Indonesia, yaitu: golongan masyarakat kelas atas, menengah, dan bawah. Golongan masyarakat kelas atas adalah lapisan masyarakat minoritas yang memegang sebagian besar kekuasaan di Indonesia. Masyarakat ini terdiri dari para penguasa dan elit politik di Indonesia. *Influence* mereka cukup besar di dalam kehidupan bernegara, sehingga langkah apapun yang diambil oleh mereka akan mempengaruhi situasi sosial-politik di Indonesia juga. Mereka sering kali dianggap sebagai tumpuan bagi masyarakat kelas bawah walaupun perilaku mereka belum mencerminkan suatu kebajikan dalam bertindak.

Masyarakat golongan atas, yang memiliki kekuasaan yang besar, cenderung untuk melakukan tindakan sewenang-wenang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Dalam rangka mengejar cita-cita politiknya, seorang penguasa mampu untuk berbuat apapun demi kepentingannya. Didukung oleh kekuatan finansial yang banyak, mereka leluasa

untuk melakukan rencana-nencana politik yang terkadang tidak bertanggungjawab. Rencana-nencana politik itu bisa saja berupa tindakan provokasi massa untuk mengguncang keamanan negara serta kursi pemerintahan dan/atau melakukan tindakan suap kepada aparat penegak hukum. Kepentingan sosial dan politik masyarakat kelas atas tidak pernah benar-benar murni sebagai sebuah pengabdian kepada rakyat. Di balik janji-janji yang mereka lontarkan itu terkandung skema politik yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Masyarakat kelas menengah, sebagai kekuatan penggerak utama dalam demokrasi di Indonesia – yang memiliki bekal pendidikan yang memadai dan taraf hidup yang cukup – justru menjadi golongan masyarakat yang kurang berperan dalam penentuan nasib bangsa dan negara. Golongan masyarakat ini tidak mudah untuk dimanipulasi dan dikerahkan secara massal oleh pihak yang berkepentingan, oleh karena kedewasaan mereka dalam berpikir (karena latar belakang pendidikan mereka) dan kebebasan dalam faktor produksi (karena taraf perekonomian yang cukup). Opini, aspirasi, dan kritik mereka terhadap perkembangan sosial-politik masyarakat serta pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam rangka mencapai cita-cita demokrasi. Akan tetapi, mereka sudah bosan dengan segala konflik dan *maneuver* politik yang terjadi di dalam negeri. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang tetap ingin terjun ke dunia politik. Alhasil, mereka tidak mempedulikan urusan perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Mereka lebih tertarik untuk mengurus urusan-urusan pribadinya dan pekerjaannya.

Masyarakat golongan kelas menengah tidak memiliki kesadaran untuk menjadi *agent* perubahan sosial-politik. Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kedewasaan intelektual, tentunya mereka telah memahami ‘tindak-tanduk’ politik yang dijalankan oleh penguasa dan kaum elit. Hal inilah yang membuat mereka enggan untuk berkecimpung dalam dunia sosial-politik. Mereka mengetahui bahwa kehidupan berpolitik di Indonesia masih menggunakan cara-cara lama yang masih mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Masyarakat kelas bawah, yang memiliki strata sosial-ekonomi yang rendah, adalah golongan masyarakat yang sering dijadikan mainan politik oleh kaum elit negara. Kaum elit yang berkepentingan akan memberi hasutan dan

'sogokan' bagi mereka untuk membangun massa dan memerintahkan mereka untuk melakukan aksi *anarchist*. Mereka adalah golongan masyarakat yang sangat potensial untuk melakukan tindak kekerasan, baik karena menanggapi tekanan hidupnya sendiri maupun karena dimanfaatkan oleh orang dengan kepentingan tertentu (Oetama, 2001: 117). Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mendapat kesempatan menikmati kemewahan fasilitas kota-kota besar di Indonesia sebagai kota metropolitan.

Masyarakat kelas bawah, yang hidup di bawah garis kemiskinan, tidak akan mungkin mengerti dan membutuhkan demokrasi. Mereka tidak mungkin mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan sosial-politik, sebab mereka belum memiliki kebebasan berpikir dan finansial. Mereka masih memikirkan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan pokok semata-mata. Jadi, siapapun yang mampu untuk memberikan mereka kecukupan materi akan dianggap sebagai orang yang baik. Secara polos dan naif, mereka akan mudah saja untuk menjadi pendukung 'buta' dari orang tersebut. Maraknya praktik korupsi yang terjadi di pemerintahan berakibat parah terhadap prestasi di segala bidang kehidupan yang membuat masyarakat menjadi *mediocre*.

Kehidupan demokrasi di Indonesia memang tampak bergairah dengan semakin gencarnya dialog-dialog yang terjadi di antara kaum elit dan penguasa. Namun, dialog yang terjadi di antara mereka seringkali tidak mengutamakan nilai-nilai kesopanan dalam berbahasa. Penyampaian visi dan misi seorang calon presiden kini telah terbiasa diselingi oleh hinaan atau sindiran terhadap calon presiden yang lain. Begitu pula di dalam tubuh partai itu sendiri, hinaan dan cercaan terhadap partai lain sering terdengar. Perilaku elit politik yang seperti ini sangat mudah untuk ditiru oleh rakyat kecil yang kurang berpendidikan. Mereka akan menganggap bahwa orang-orang yang tidak separtai atau sepaham dengan dirinya adalah musuh.

Tanpa pengarahan dan pengendalian dari pemegang kekuasaan, rakyat menjadi bertindak semaunya sendiri. Tanpa pengarahan dan pengendalian dari pemegang kekuasaan, rakyat akan mencari 'tuan' yang lain. Hilangnya pengarahan dan pengendalian negara terhadap rakyat ini sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggoyang tampuk kepemimpinan. Rakyat

masih dilihat sebagai gumpalan massa yang dapat direkayasa untuk kepentingan partai yang amat *partizan*¹⁹ (Oetama, 2001: 200).

Bila sering terjadi pertikaian di sebuah daerah atau negara, maka akan timbul keamanan dan ketatanegaraan yang tidak stabil. Akibat dari kondisi keamanan yang tidak stabil, proses pemerintahan-pun akan semakin lemah. Keadaan seperti demikian sangat menguntungkan penguasanya. Penguasa akan kehilangan 'batu sandungannya' di dalam berkuasa. Kekuasaan akan tetap 'langgeng' dan sulit tergoyahkan karena perhatian masyarakat lebih tertuju untuk bagaimana caranya mengembalikan keamanan (Oetama, 2001: 19).

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam ras, agama, dan etnis ini sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Keadaan seperti sekarang, di mana rakyat sedang *temperamental* dan kesusahan seperti ini dapat menyebabkan peristiwa kekerasan yang terus-menerus dan tersebar luas. Sementara itu, pejabat-pejabat dan kaum elit tetap tidak bergeming dalam menyaksikan kehancuran bangsa ini. Kegiatan dan sikap mereka yang tidak berubah telah melestarikan skandal korupsi besar-besaran. Persaingan sengit memperebutkan kekuasaan terus berlangsung di antara kekuatan-kekuatan yang berkuasa. Mereka berusaha untuk mempertahankan kekuasaan melalui pendekatan konstitusionalisme, SARA, dan politik uang (Manning dan Van Diermen, 2000: 253).

Fungsi-fungsi demokrasi di dalam dunia perpolitikan adalah sebagai sebuah sistematis pemecahan masalah di mana solusi atas sebuah kondisi politik yang panas cukup hanya dengan dialog dan perdebatan wacana/*discourse*, bukan dengan peperangan ataupun konfrontasi berdarah. Demokrasi menekan sekecil mungkin akan timbulnya militansi di dalam kehidupan sosial-politik. Ancaman kekerasan karena perbedaan kepentingan politik menjadi minimal (Denny J.A, 2006: 185). Artinya, budaya-budaya politik yang tidak etis – seperti politik uang dan 'adu domba' – merupakan budaya yang sudah tidak pantas lagi untuk dipraktikkan di dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Ini merupakan suatu budaya terdahulu yang sudah 'usang'. Ini adalah cara-cara berpolitik pada zaman penjajahan dan otoritarian yang telah lama ditinggalkan.

¹⁹ Mendukung setia suatu partai/golongan/kelompok secara fanatik atau berlebihan.

Kehidupan berdemokrasi yang seperti ini, secara disadari atau tidak, telah memasukkan masyarakat Indonesia ke dalam sebuah sistem besar. Sistem ini begitu kuatnya membudaya di dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia, sehingga tidak mudah bagi masyarakat untuk memberontak darinya. Sistem yang dibuat oleh para kaum minoritas elit politik ini bertendensi untuk ‘melanggengkan’ kekuasaan mereka di Indonesia. Sistem ini selalu berupaya untuk menciptakan rakyat yang *mediocre* agar mereka kehilangan daya kreatifitas dan kehendak untuk berkuasa. Sistem ini membasmi potensi calon-calon individu terbaik. Represi kaum penguasa terhadap rakyat dibuat sehalus mungkin, agar rakyat tidak merasa ditindas. Budaya yang merepresi rakyatnya hanya akan menghasilkan kerumunan manusia massal.

Semangat demokrasi memang sudah lebih terasa dan gencar dibandingkan pemerintahan-pemerintahan yang terdahulu. Akan tetapi, demokrasi masih sebatas konsep untuk membentuk suatu pemerintahan. Demokrasi belum dijadikan suatu ‘nafas’ kehidupan sosial-politik yang baik. Jargon-jargon politik hanyalah angan-angan semu yang menipu rakyat.

Ketidakmampuan masyarakat untuk melepaskan diri dari sistem membuat daya hidup manusia menjadi ‘tumpul’. Manusia memang tidak merasa dirugikan secara langsung oleh sistem seperti ini, namun secara disadari atau tidak manusia menjadi tidak berdaya. Manusia menjadi malas dan bodoh, karena ia merasa tidak perlu lagi memikirkan kehendak untuk berkuasanya. Manusia yang *stagnant* dan sekedar menerima kondisi seperti ini adalah manusia yang bermoral budak, yaitu manusia yang mengalami penurunan derajat dan nilai. Kepasrahan manusia terhadap sistem adalah sebuah alienasi.

4.2 Kritik Aristokrasi *Übermensch* Terhadap Kehidupan Demokrasi di Indonesia

Penguasa, sejak zaman penjajahan hingga rezim Orba, adalah sebuah kekuatan yang mampu memerintahkan dan mengatur masyarakat Indonesia dalam setiap ‘sendi’ kehidupan. Perintah dari penguasa sangatlah keras dan memaksa, sebab bila tidak dilaksanakan oleh rakyat maka mereka akan diberi hukuman yang berat. Penguasa di sini benar-benar ‘mendikte’ rakyat agar rakyat tidak berani dan

takut untuk berhadapan dengannya. Bila rakyat tidak berani untuk menghadapi penguasa maka tidak akan ada pihak yang menggoyang kedudukan penguasa sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Kini, masyarakat Indonesia telah terbebas dari kekuasaan yang otoriter. Era reformasi di Indonesia adalah zaman berakhirnya kekuasaan yang otoriter di Indonesia. Cita-cita bangsa yang telah lama dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia untuk memiliki negara yang bebas dan demokratis sudah terbuka. Demokrasi mulai terlihat melalui mobilisasi sosial-politik yang digencarkan oleh masyarakat Indonesia. Demokrasi di Indonesia ditandai oleh kegiatan-kegiatan antara lain: keberhasilan menyelenggarakan pemilu, keberhasilan dalam memberantas korupsi, kebebasan pers dan masyarakat untuk mengkritik penguasa, kebebasan untuk berserikat, dll.

Cita-cita reformasi untuk membentuk masyarakat demokratis yang memiliki kebebasan dan keadilan masih jauh dari harapan. Reformasi justru membuat suatu pemerintahan yang tidak produktif. Pemerintah memang berkuasa tetapi tidak memerintah. Hal ini dapat dipahami karena sebagian dari pemerintah adalah kroni-kroni dari Soeharto. Loyalitas dan tindakan mereka tetap tergantung padanya. Jika, aparaturnya tidak memihak pada pemerintahan reformasi, maka dukungan terhadap pemerintah menjadi lemah. Ketika daya dukung terhadap kekuasaan terus melemah dan 'tergerogoti', penegakan hukum menjadi kehilangan arti (Oetama, 2001: 96). Hukum beserta aparatnya telah lumpuh. Masyarakat terlalu bebas mengeluarkan aspirasinya dalam bentuk apapun dan di manapun, yang sering kali berlangsung secara *anarchist*. Kebebasan berekspresi 'dibayar mahal' dengan goyahnya stabilitas negara.

Oleh karena itu, penulis telah menemukan tiga sikap mental yang mampu untuk memperbaiki kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Tiga sikap mental itu adalah: pemberontakan terhadap sistem, semangat Aristokrasi *Übermensch*, dan pentingnya nilai kemandirian. Apabila ketiga sikap mental ini telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia maka Indonesia akan memiliki sosok penguasa yang kreatif dan membawa kemajuan pada bangsa.

4.2.1 Pemberontakan Terhadap Sistem

Corak kekuasaan pada masa Orde baru adalah kekuasaan diktatorial yang otoriter. Rezim otoriter bertendensi untuk melakukan penyeragaman terhadap manusia-manusia Indonesia. Pada masa kekuasaan Soeharto, masyarakat sipil ditekan secara sistematis (Manning dan Van Diermen, 2000: 9). Penekanan ini berguna untuk mematikan bakat dari calon-calon manusia besar yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelangsungan dari sistem kekuasaan ini. Di dalam sistem Orde Baru ini, Soeharto sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi tidak boleh tergantikan. Hak-hak rakyat sebagai warga negara – bahkan sebagai manusia – dicabut. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa harus diikuti dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa ada pilihan. Dalam jangka waktu yang lama, perintah dari penguasa ini akan membentuk kepatuhan (*obedience*) dan ketergantungan oleh masyarakat. Pola pikir masyarakat telah terpasung untuk tidak memikirkan hal-hal mengenai politik dan kekuasaan.

Masyarakat Indonesia terbiasa untuk hidup teratur melalui perintah langsung dari pusat kekuasaan. Masyarakat Indonesia belum cukup mandiri untuk mengatur negaranya karena mereka terbiasa bertindak berdasarkan instruksi. Instruksi tidak pernah mendewasakan, karena menciptakan ketergantungan tiada henti (Oetama, 2001: 111). Mental masyarakat Indonesia, yang telah lama terjajah dan tertindas, sebenarnya belum siap untuk menghadapi kebebasan dalam kehidupan sosial-politik. Hilangnya instruksi berdampak pada hilangnya tujuan, arahan, dan panduan bagi masyarakat. Konsekuensi logis dari penggulingan rezim Orba adalah rakyat kehilangan suatu kekuatan yang selama ini mengendalikan dan mengatur kehidupan bermasyarakat.

Penindasan terhadap rakyat Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintahan kolonialisme serta otoritarianisme telah menjadi sebuah budaya. Budaya penindasan ini telah membatasi manusia-manusia Indonesia untuk maju. Individu-individu yang memiliki potensi untuk menjadi individu yang terbaik dibandingkan yang lainnya telah dikekang oleh pemerintah. Akibatnya, individu-individu tersebut akan kehilangan kesempatan dan potensinya untuk mengembangkan diri menjadi individu yang menonjol. Ia hanya akan menjadi

manusia massal yang biasa sama seperti manusia lainnya. Calon-calon manusia yang terbaik dianggap sebagai pengancam kekuasaan yang sedang berlangsung. Munculnya individu yang demikian harus direpresi agar tidak menjadi besar; bahkan kalau perlu dibinasakan. Penguasa membentuk suatu budaya ke dalam masyarakat yang mana kemampuan masyarakatnya hanya sedang-sedang atau rata-rata saja. Kebudayaan yang menganjurkan sikap *durchschnittlich* (rata-rata) hanya akan membasmi bakat-bakat dan menotalisir para individu menjadi kawan.

Sistem yang merepresi rakyat secara langsung seperti yang dipraktikkan pada masa Orba ini memang sudah hilang, namun esensi penindasan dan alienasi terhadap masyarakat masih terbawa hingga kini. Kelompok elit yang mementingkan diri sendiri, kelompok menengah yang enggan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat, serta kelompok masyarakat bawah yang 'diinjak-injak' martabatnya, adalah fenomena suatu *grand-design*²⁰ yang sama dengan zaman otoritarian. Demokratisasi hanya merupakan penghalusan dari sistem yang mengalienasi ini. Suasana demokrasi tetap akan bermuara pada kepentingan pihak-pihak tertentu.

Hidup di dalam suatu sistem, budaya, atau penilaian orang lain adalah hidup yang tidak menyenangkan. Manusia dikekang dan dialienasi di dalam suatu *mechanism* besar yang semakin mengaburkan esensinya sebagai manusia. Kesulitan, masalah, bahkan maut, siap untuk menghampiri siapa saja. Inilah yang disebut dengan tragedi. Tragedi adalah hidup yang menyedihkan dan penuh dengan penderitaan. Akan tetapi, manusia tidak boleh mengutuk lalu melarikan diri dari tragedi, sebab tragedi merupakan seni di dalam kehidupan. Manusia harus tetap menjalani hidup yang penuh dengan tragedi ini, sebab bagaimanapun juga tragedi akan datang dalam berbagai kemungkinan. Problematika di dalam kehidupan harus dilawan dengan keteguhan hati.

Manusia harus mampu untuk melepaskan diri dari ketidakberdayaannya. Inilah saat di mana manusia memberontak dari nilai-nilai lama untuk mulai menentukan nasibnya sendiri. Manusia yang seperti ini adalah manusia yang mengalami *nihilism*. Ia sudah tidak percaya dengan segala nilai-nilai yang

²⁰ Perencanaan besar.

terdahulu. Semua perintah dan larangan sudah tidak dihiraukan lagi. Tanpa ada yang memerintahkan, manusia menjadi bebas. Manusia bisa melakukan apa-pun yang dikehendakinya serta meluapkan segala bentuk ekspresi dan daya hidupnya tanpa rasa takut akan adanya larangan ataupun ancaman. Manusia bebas untuk menyalurkan daya-daya hidupnya.

Manusia yang tidak mampu untuk melawan kerasnya kehidupan hanya akan pasrah dan tunduk kepada sistem-sistem sosial kemasyarakatan yang berlaku. Ia ‘menghambakan’ dirinya kepada *mechanism* besar tersebut. Ia beranggapan bahwa dengan menyerahkan jiwa dan raganya pada suatu sistem ini akan memberikannya kehidupan yang lebih layak, seperti: penghasilan, keadilan, kebebasan, dan kehidupan demokratis. Penyerahan diri manusia kepada sistem membuatnya menjadi lemah, takluk, rendah hati, pasrah, mudah dipermainkan, dan tak berdaya. Kepatuhan pada sistem mengakibatkan manusia bergumul dengan hati nuraninya sendiri dan merintanginya untuk mengembangkan kehidupan secara bebas. Ini merupakan sebuah pemerosotan derajat manusia. Bagaimanapun juga indahya mimpi-mimpi yang dijanjikan sebuah sistem, ia hanyalah ciptaan dan manipulasi manusia – yang memiliki kehendak untuk berkuasa. Tujuan dan mimpi-mimpi yang dijanjikan di dalamnya sekedar omong kosong dan tipuan belaka. Orang yang mencipta sistem hanya ingin memantapkan dan meluaskan kekuasaannya, bukan untuk menyejahterakan kehidupan manusia lain. Manusia lain tetap dibiarkan menderita.

Hakikat yang melandasi kehidupan manusia adalah kehendak untuk berkuasa. Kehendak untuk berkuasa hanya dapat tercapai dan tersalurkan bila manusia itu masih hidup. Semua manusia yang hidup menginginkan kebebasan. Tiada satu-pun manusia yang mau untuk dibatasi ruang geraknya. Pembatasan ruang gerak dan keterkungkungan membuat jiwa manusia menjadi penakut. Rasa takut tidak akan memberi kemajuan pada manusia. Rasa takut akan menafikan keinginan manusia untuk mencari makna dalam kehidupan. Hanya melalui kebebasan-lah manusia dapat menyelami petualangan untuk mengerti arti kehidupan. Jiwa yang bebas memahami hasrat sejatinya di dalam hidup, yaitu kehendak untuk berkuasa.

Zaman reformasi di Indonesia ternyata belum memberikan sebuah masyarakat yang demokratis. Digantikannya rezim yang menindas rakyat justru membuat hilangnya unsur pemerintahan itu sendiri. Era demokratisasi justru tidak dapat mengendalikan stabilitas negara. Akibat terguncangnya stabilitas negara, maka pemerintah kehilangan kekuatannya sebagai pengatur masyarakat. Keadaan negara yang tidak stabil adalah suatu tragedi. Imbas dari masalah ini kepada rakyat berupa hilangnya pengarah dan pengendalian. Rakyat Indonesia belum memiliki moralitas tuan, mereka masih harus dipimpin dan diperintah. Yang tinggal hanyalah sistem-sistem kemasyarakatan yang dibentuk oleh orang-orang tak bertanggungjawab yang hanya berorientasi kepada kemakmuran pribadi. Sistem-sistem inilah yang nantinya mengatur dan mengendalikan masyarakat.

4.2.2 Semangat Aristokrasi Übermensch

Kerumunan massa manusia merupakan sebuah sarana untuk mencapai suatu tujuan utama dalam hidup. Tujuan utama dalam hidup bukanlah untuk memajukan manusia secara massal tetapi manusia secara individu. Massa adalah suatu lahan 'pendidikan' bagi individu-individu yang berbakat. Individu yang seperti ini tidak akan puas terhadap kehidupan yang terus memaksanya untuk menjadi manusia biasa. Ia merasa harus bisa untuk memajukan hidupnya sendiri – namun tidak mungkin baginya untuk tetap mengutamakan nilai kebersamaan dengan manusia lainnya. Manusia yang bersikap *altruistic*, sebuah nilai yang mengutamakan kepentingan dan kehidupan orang lain, adalah sikap manusia yang bermoral budak. Calon-calon individu terbaik harus dapat memutarbalikkan nilai-nilai seperti ini.

Transvaluasi adalah suatu peristiwa pemutarbalikkan nilai-nilai terdahulu yang mengutamakan kebersamaan sebagai sesama manusia kepada keutamaan sebagai seorang individu. Nilai yang ditransvaluasi adalah rasa belas kasih kepada sesama rakyat yang tertindas menjadi egoisme yang menjunjung tinggi derajat individu. Apabila seorang individu tidak melakukan transvaluasi, artinya ia masih bernaung di bawah nilai-nilai lama yang mengutamakan kepentingan manusia lain, maka ia tidak dapat mewujudkan keinginannya sebagai manusia sejati untuk berkuasa. Transvaluasi ini hanya berlaku pada jiwa-jiwa yang bebas.

Peristiwa penciptaan nilai ini tidaklah mudah dan dalam waktu yang singkat. Proses penciptaan nilai ini sarat dengan proses *trial and error*²¹, jadi proses ini tidak pula bisa dilakukan oleh banyak orang – hanya segelintir manusia yang berpotensi, berbakat, berorientasi ke pada masa depan, dan berjiwa besar yang mampu melakukannya. Individu seperti ini adalah manusia yang bermoral tua yang akan menjadi calon *Übermensch*.

Hidup memang diwarnai dengan penderitaan, akan tetapi di dalam penderitaan itulah nantinya manusia akan menemukan jati dirinya sebagai manusia sejati. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan unsur-unsur yang menyenangkan dan menyedihkan. Persatuan antara unsur yang menyenangkan dengan yang menyedihkan ini disebut tragedi. Tragedi adalah seni. Jadi, manusia yang berani untuk menghadapi tragedi dan *survive* darinya adalah manusia hasil dari mahakarya kehidupan. Manusia ini disebut *Übermensch* – manusia terbaik yang dihasilkan oleh masyarakat yang mencintai takdir dalam kehidupan itu sendiri sebagai manifestasi dari kehendak untuk berkuasa.

Manusia yang kuat dan cerdas tentunya tidak hadir dalam jumlah yang banyak. Jika sebagian besar manusia telah tersingkir, maka ada pula segelintir manusia yang tetap berani dan mampu untuk terus melawan penderitaan dalam hidupnya. Ia adalah jenis manusia yang telah melewati dan *survive* dari pahitnya kehidupan. Apa yang tidak dapat ‘membunuhnya’ membuatnya semakin kuat. Jenis manusia yang seperti ini adalah manusia yang mulia, di mana sifat-sifat dan perilakunya mencerminkan kebajikan moral. Manusia seperti ini merupakan pengejawantahan dari moralitas tua – suatu taraf hidup yang mengatasnamakan kehendak untuk berkuasa sebagai keutamaan sejati.

Kata reformasi, secara etimologis terdiri dari kata *re* (ulang) dan *forma* (bentuk), dalam bahasa Latin artinya pembentukan ulang. Pembentukan ulang di dalam istilah reformasi dalam demokrasi di Indonesia berarti membentuk pemerintahan dengan segala perangkat kenegaraannya yang baru. Bentuk pemerintahan yang terdahulu dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan dan kebebasan kepada rakyat. Nilai dan norma yang telah dibentuk oleh penguasa yang terdahulu sudah dianggap kuno dan harus digantikan dengan nilai-nilai yang

²¹ Suatu proses percobaan dan pengujian yang melewati kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

baru. Kekuasaan yang mengekang hak-hak sosial-politik warga negaranya sudah tidak bisa diterima lagi.

Pada dasarnya, reformasi yang dianggap sebagai kebebasan memang hanya berlaku bagi manusia yang bermoral tuan. Manusia yang bermoral budak tidak menganggap 'kebebasan' dalam reformasi ini sebagai sebuah kebebasan seperti dalam moralitas tuan. Kebebasan menurut budak adalah bebas untuk melakukan tindakan pengrusakan dan *anarchist* karena tidak ada lagi yang aturan yang melarang dengan keras; sedangkan kebebasan menurut moralitas tuan dan cita-cita reformasi adalah penataan ulang nilai-nilai yang telah dimanipulasi oleh penguasa zaman terdahulu karena tidak dapat menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia budak hanya melihat reformasi sebatas kebebasan bertingkah laku semaunya sendiri, bukan kesempatan untuk menciptakan nilai yang baru, sehingga walaupun 'angin' reformasi dan kebebasan telah berhembus mereka tetap menjadi manusia budak. Manusia yang bermoralitas budak nantinya hanya menjadi pengikut bagi manusia yang bermoral tuan.

Era reformasi adalah zaman kebangkitan manusia Indonesia untuk hidup bebas. Jiwa manusia yang bebas adalah modal utama dalam penciptaan *Übermensch*. Segala nilai moral yang ada sebelumnya, yang cenderung untuk memperbaiki manusia secara mayoritas di mana kebanyakan dari mereka adalah manusia yang tidak layak, kini harus bisa dirubah berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan individu-individu jenius untuk mengembangkan dan meningkatkan kepribadian-kepribadian yang superior. Reformasi akan diwarnai dengan konflik-konflik yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dari sinilah nantinya akan muncul *Übermensch*. *Übermensch*, yang memiliki moral tuan dan kualitas sebagai penguasa, adalah sosok manusia yang telah melewati berbagai macam tantangan kehidupan dengan menciptakan nilai-nilai moralnya sendiri. Manusia yang hidup pada zaman reformasi adalah manusia yang individualistis dan hanya bisa dinilai menurut dirinya sendiri.

Manusia yang mulia adalah manusia yang piawai, cerdas, kuat, serta '*ulet*' dalam menaklukkan kerasnya hidup. Letak kemuliaan manusia adalah pada kemampuannya untuk mengafirmasi kehidupan. Kehidupan manusia yang berani untuk melawan segala tantangan hidup dan mendambakan dirinya sebagai

individu terbaik adalah kehidupan Aristokrasi *Übermensch*. Aristokrasi *Übermensch* mengindikasikan bahwa kelangsungan hidup individu hanya ada pada individu itu sendiri.

Aristokrasi *Übermensch* melawan kerasnya hidup tidak hanya datang dari buasnya alam liar yang bebas, tetapi juga pertarungan dan persaingan antara satu manusia dengan manusia lain. Kehidupan di dalam masyarakat yang penuh dengan konflik dan *intrigue*, merupakan proses *selection* bagi jenis-jenis manusia untuk ditempa dalam kerasnya hidup. Hasil dari proses *selection* ini nantinya akan tercipta jenis yang gagal dan yang unggul. Semangat Aristokrasi *Übermensch* menuntut manusia untuk mandiri dan selalu mengembangkan diri. Manusia Aristokrasi *Übermensch* melihat masyarakat sebagai tragedi dan seni hidup.

Aristokrasi *Übermensch* menganggap bahwa kebajikan utama adalah untuk tetap bertahan hidup. Untuk tetap bertahan hidup maka manusia harus berkuasa. Manusia belum dianggap telah berkuasa, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, apabila ia masih terpaku pada nilai-nilai yang sudah ada. Seseorang akan dikatakan berkuasa apabila ia mampu untuk 'mengatasi segala-galanya yang ada pada saat ini'. Manusia seperti ini menganggap apa yang telah terwujud dan ada pada waktu sekarang ini sudah tidak mencukupi kehendak individunya lagi. Ia merasa butuh untuk memiliki hal-hal dan nilai-nilai baru yang hanya dimengerti olehnya. Praktis, dia akan menciptakan hal dan nilai baru itu sendiri, yaitu nilai yang belum pernah ada sebelumnya. Penciptaan nilai yang belum pernah ada sebelumnya merupakan cara berpikir yang menatap ke masa depan. Jadi, Aristokrasi *Übermensch* adalah sosok manusia unggul yang tidak hanya menanggulangi kekinian, ia bahkan telah memiliki pandangan ke masa depan. Pandangan ke masa depan adalah kemajuan.

Oleh karena itu, manusia Indonesia yang hidup pada zaman reformasi harus menggunakan kebebasan ini dengan sebaik-baiknya. Setiap individu – apakah ia datang dari golongan masyarakat kelas atas, menengah, atau bawah – harus berani untuk mengadakan transvaluasi yang selama ini membatasi diri untuk mengembangkan dan memperbesar kekuasaan. Moralitas tuan bukan berarti nilai-nilai yang hanya dimiliki oleh penguasa, sebaliknya moralitas budak bukan hanya nilai-nilai yang terdapat pada rakyat. Siapapun yang berani untuk melakukan

penegasan dalam hidup serta melepaskan diri dari penilaian orang lain dengan membuat nilai sendiri adalah tuan, sebaliknya manusia yang hanya bersembunyi di balik penilaian orang lain karena tidak berani untuk hidup dalam tragedi adalah budak.

4.2.3 Pentingnya Nilai Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk mengatur atau mengelola urusan-urusan, membuat keputusan, dan memenuhi keinginannya sendiri secara otonom. Kemandirian juga merupakan sikap yang menolak penyesuaian diri terhadap lingkungan dari tetapan-tetapan yang salah, dengan terus mengikuti naluri dan gagasan sendiri. Kemandirian merupakan kebalikan dari ketergantungan, yaitu suatu kondisi pada subjek yang mengandalkan orang lain yang dianggap lebih daripada dirinya, sebagai tempat diserahkannya nasib subjek tersebut. Nilai kemandirian membuat masyarakat Indonesia lebih mampu untuk bangkit dari keterpurukan kondisinya tanpa mengharapkan bantuan dari pihak lain.

Seorang penguasa yang tidak memiliki jiwa kemandirian, akan sangat bergantung kepada pihak-pihak lain dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya. Ketergantungan ini biasanya terletak di 'tangan' rakyat atau pada kroni-kroni. Penguasa, sebagai orang yang memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi, mendapatkan dukungan rakyat melalui janji-janji dan pemberian imbalan. Rakyat tentunya akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh penguasa apabila mereka diberi imbalan secara langsung. Sebagai balas jasa, dengan mudah rakyat akan mendukung penguasa. Tanpa disadari, rakyat juga akan merasa terus tergantung oleh imbalan penguasa. Dari sinilah nantinya akan timbul sistem *backward-looking*; sistem yang menghalangi penguasa untuk berpikir kreatif sekaligus mengalienasi rakyat.

Sistem *backward-looking* ini menyebabkan rakyat semakin miskin, tertindas, dan terasing dari kehidupannya, sebab sistem ini bertendensi untuk menguntungkan pihak penguasa saja. Rakyat yang teralienasi dan menghamba pada penguasa adalah perwujudan dari moralitas budak. Sistem ini telah menjadi tradisi turun-temurun sejak kekuasaan terdahulu yang belum demokratis hingga

sekarang. Konsekuensi logis dari pelestarian sebuah sistem yang terdahulu adalah tidak adanya suatu langkah-langkah pembaharuan di dalam cara berpikir penguasa dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Penguasa yang tidak mampu untuk 'mendobrak' tradisi dan sistem yang lama demi terciptanya gagasan yang baru juga merupakan perwujudan dari moralitas budak.

Bagaimana mungkin sebuah bangsa akan maju apabila dipimpin oleh seorang penguasa yang berorientasi kepada pemikiran masa lampau? Seorang pemimpin seharusnya memiliki *capability* melebihi orang-orang yang ada pada zamannya. Tidak akan mungkin seseorang mampu melebihi dan mengatasi apa yang sudah ada pada zamannya tanpa pemikiran ke depan.

Konsep Aristokrasi *Übermensch* membuat seseorang menjadi mandiri di dalam bertindak. Jiwa aristokrasi akan memandang bahwa manusia yang mampu untuk terus mengembangkan dirinya akan mampu untuk mengatasi kerasnya hidup di dalam masyarakat. Ia beranggapan bahwa masyarakat tidak bisa dijadikan tumpuan hidup bagi individu, sebab hidup di dalam masyarakat sama halnya dengan hidup di alam. Kehidupan alami penuh dengan penaklukan, artinya siapapun yang tidak mampu untuk berkembang dan mempertahankan diri maka akan tersingkirkan dan binasa.

Übermensch, sebagai hasil dari tempaan aristokrasi, adalah manusia yang telah mengatasi kerasnya hidup. Bagi *Übermensch*, apa yang ada pada zaman ini sudah bukan tantangan lagi. Ia membutuhkan dan menciptakan sesuatu yang masih di luar jangkauan zamannya. Sesuatu yang berada di luar jangkauan zaman adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Gagasan yang belum pernah ada sebelumnya merupakan gagasan masa depan. Jadi, Aristokrasi *Übermensch* akan membuat seseorang menjadi mandiri dan memiliki pandangan ke masa depan. Pandangan ke masa depan merupakan sebuah pembaharuan. Seorang penguasa yang mampu membawa pembaharuan adalah sosok penguasa yang berpikiran maju. Ia tidak akan mau untuk berdiam diri menyaksikan kehancuran bangsa tanpa ada perubahan.

Rakyat miskin tidak boleh terpancing emosi oleh kondisi hidup dan kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Walaupun mereka tidak memiliki *asset* apapun yang dianggap berharga sebagai penopang hidup, setidaknya mereka

harus tetap memiliki harga diri sebagai manusia. Harga diri membuat manusia malu untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Tindakan yang merugikan itu tidak hanya berupa perilaku *anarchist*, tetapi juga perilaku yang menyalahgunakan kesempatan di era reformasi ini untuk membebaskan diri dari anggapan dan penilaian masyarakat. Harga diri seseorang membuatnya malu untuk terus hidup berdampingan dengan manusia kawanan, sebab hal itu adalah moralitas budak.

Rakyat harus memiliki kemandirian dalam bidang sosial-politik untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Kemiskinan jangan dijadikan alasan bagi rakyat untuk menerima mentah-mentah terhadap hasutan ataupun janji-janji para penguasa. Tujuan dari kerja keras seorang manusia bukanlah demi peningkatan kualitas hidup manusia lainnya, melainkan demi perkembangan individu-individu unggul yang lebih baik dan lebih kuat. Kemandirian harus diisi dengan perbuatan kebajikan. Kondisi sosial-politik yang bergejolak jangan dianggap sebagai sebuah rintangan untuk berkreasi. Mereka harus menanamkan jiwa *ja-sagen*, tidak menyerah lari atau menegasi kehidupan ini, justru sebaliknya mereka menantang dan mengafirmasinya. Rakyat harus hidup secara *amor-fati*, sebab dengan cara seperti inilah hidup menjadi lebih berguna.

Nilai kemandirian pada rakyat, yang tidak terpengaruh pada janji-janji serta provokasi kaum elit yang berkepentingan, akan memberi kedewasaan dan kemajuan pada rakyat dalam mengejar cita-cita politiknya. Selain itu, nilai kemandirian juga akan berdampak pada rakyat berupa semangat hidup dan keyakinan diri untuk mampu melepaskan diri dari kemiskinan. Nilai kemandirian pada kaum penguasa menuntut mereka untuk memiliki moralitas tuan yang mengutamakan kejantanan, keberanian, dan kerja keras. Keutamaannya ialah untuk meningkatkan daya kehidupan dan memperbesar kekuasaan yang harus ditunjukkan dalam tindakan oleh pribadi yang melakukannya.

Rakyat Indonesia telah lama hidup terkekang dalam aturan-aturan sosial-politik yang mengikat. Sejak zaman penjajahan hingga zaman Orba berkuasa, rakyat Indonesia belum pernah mengenyam kebebasan yang dapat menjamin hak-hak sosial-politiknya. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Rakyat menginginkan

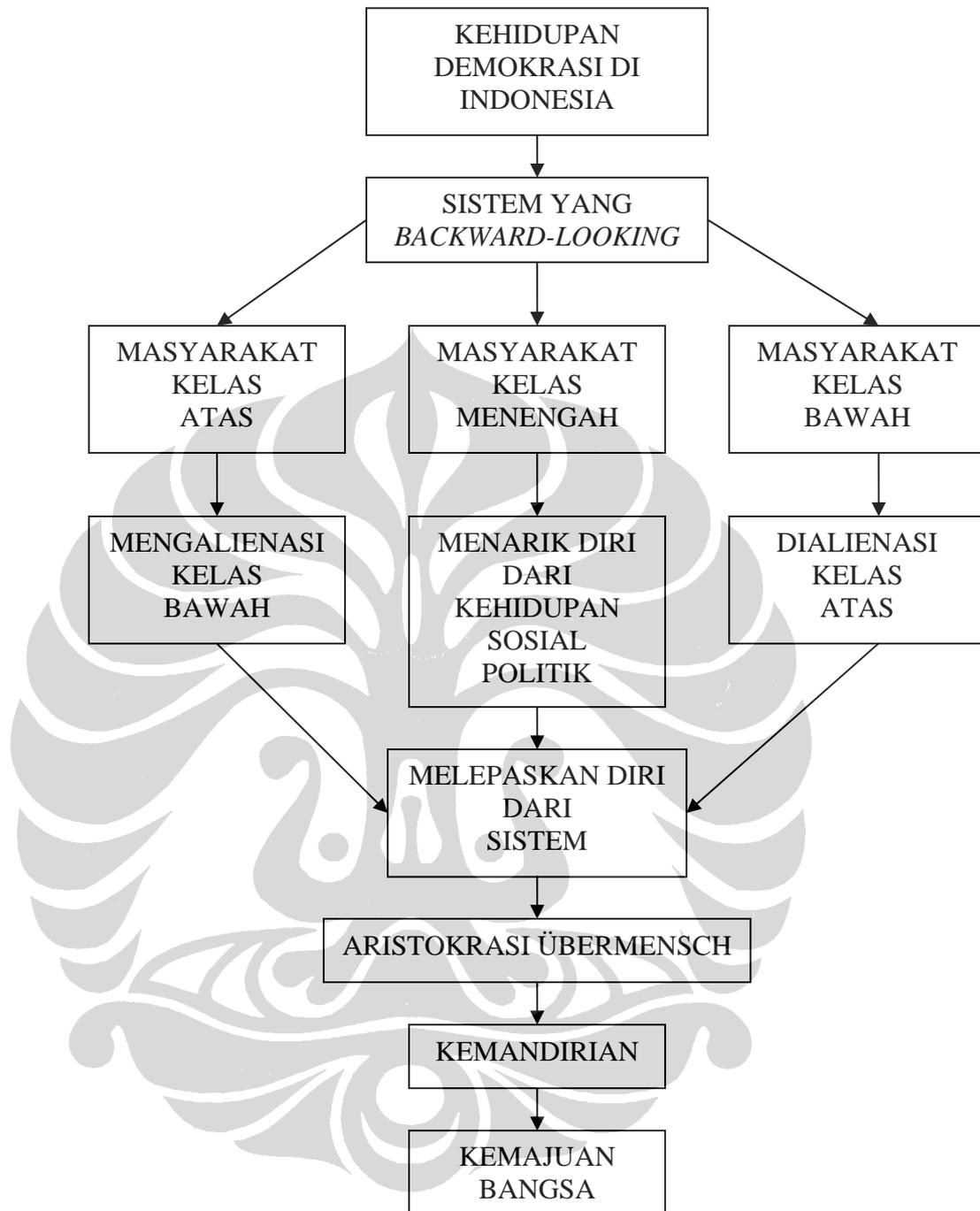
sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, sebab demokrasi akan membuat kedudukan segenap rakyat menjadi setara di dalam hukum.

Era reformasi adalah zaman keterbukaan bagi rakyat Indonesia. Tidak ada lagi represi sosial-politik yang membatasi hak manusia Indonesia untuk berekspresi sesuai kehendak jiwanya. Kebebasan, sebagai persyaratan utama dalam setiap kehidupan, telah dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia. Era reformasi menjamin kebebasan sosial-politik setiap warga negara sebagai modal utama dalam membentuk masyarakat demokratis.

Era reformasi sama halnya dengan peristiwa transvaluasi. Transvaluasi hanya dapat dilakukan oleh individu-individu yang bebas. Walaupun kebebasan adalah permulaan dari hidup yang terlepas dari segala macam aturan, nilai, dan norma yang berlaku.

Setiap kebebasan memiliki konsekuensi logis, yaitu hilangnya tatanan dan kemapanan yang ada sebelumnya ketika masih belum bebas. Maka dari itu, tatanan dan kemapanan yang hilang itu harus dibentuk kembali dengan persepsi yang baru. Tatanan yang hilang itu meliputi: nilai, moral, ilmu pengetahuan, sosial, politik, dan segala aspek dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu harus diciptakan kembali dari awal.

Manusia Indonesia, yang mampu untuk menciptakan ulang nilai-nilai lama yang terdapat dalam sistem kemasyarakatan, adalah manusia yang unggul. Ia memiliki ciri-ciri Aristokrasi *Übermensch*, yaitu sosok manusia masa depan yang memiliki semangat pembaharuan terhadap kerusakan moral yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Sosok Aristokrasi *Übermensch* adalah *being* yang pantas untuk berkuasa, karena ia memiliki daya-daya hidup dan kehendak untuk berkuasa. Kekuatan dan *intelligence* yang dimilikinya hanyalah untuk kemajuan individu. Individu yang maju akan mampu untuk membawa kemajuan pada bangsa.



BAGAN 4

Kritik Aristokrasi Übermensch terhadap Kehidupan Demokrasi di Indonesia